

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH
DASAR NEGERI KEUDE BATEE KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NAILUL MUNA
NIM. 220802116

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

NIM : 220802116

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir : Pulo Panjoe, 12 November 2000

Alamat : Pulo Panjoe, Glumpang Baro, Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian dan dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Agustus 2026

A R - R A N I R Y



Nailul Muna
220802116

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR NEGERI KEUDE BATEE KABUPATEN PIDIE

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

NAILUL MUNA
NIM. 220802116

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP.198611122015031005

Pembimbing II


Putri Marzaniar, M.P.A.
NIP.199811022024032001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH
DASAR NEGERI KEUDE BATEE KABUPATEN PIDIE

Nailul Muna
NIM. 220802116

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Agustus 2026

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

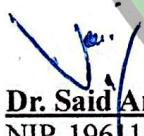
Ketua,


Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122013031005

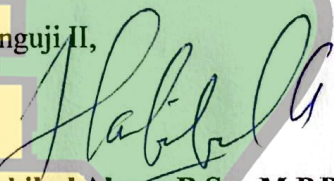
Sekretaris,


Putri Marzathar, M.P.A.
NIP 199811022024032001

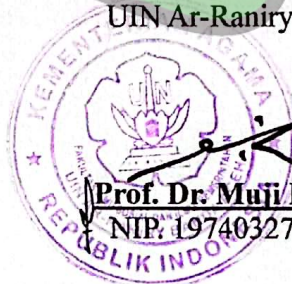
Penguji I,


Dr. Said Amirulkamar, MM., MSi.
NIP. 196110051982031007

Penguji II,


Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P.
NIP. 199407072025051005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), sehingga diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif menjadi salah satu upaya untuk memenuhi hak tersebut dengan memberikan kesempatan kepada ABK untuk belajar bersama peserta didik reguler sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya di SDN Keude Batee Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang terdiri dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, kepala sekolah, guru, dan orang tua anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif telah dilaksanakan melalui penerimaan ABK di sekolah, pembelajaran bersama peserta didik reguler, penyesuaian pembelajaran sesuai kemampuan siswa, pendampingan, serta terciptanya interaksi sosial yang baik antara ABK dan peserta didik reguler. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena belum tersedianya Guru Pembimbing Khusus (GPK), keterbatasan kompetensi guru, sarana dan alat peraga pembelajaran, belum adanya pedoman pembelajaran adaptif, serta dukungan kebijakan dan fasilitas dari pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sekolah. Kesimpulannya, implementasi pendidikan inklusif di SDN Keude Batee telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, fasilitas, pedoman pembelajaran, serta dukungan kebijakan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus, SDN Keude Batee, Kabupaten Pidie.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Shalawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Negeri Keude Batee Kabupaten Pidie”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Dr. Delfi Suganda, S.HI., L. LM, selaku Pembimbing I yang telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Putri Marzaniar, M.P.A selaku Pembimbing II yang telah membantu mengarahkan dengan penuh kesabaran, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada ibunda tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Doa yang tak pernah putus, perhatian, serta dukungan moral maupun material yang Ibu berikan di setiap masa sulit menjadi kekuatan tersendiri bagi saya untuk terus melangkah hingga menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ibu.
8. Kepada ayah tercinta, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dukungan yang selama ini diberikan, meski tidak selalu disampaikan lewat kata-kata. Di balik sikap Ayah yang tenang, saya memahami ada harapan besar yang menjadi alasan bagi

saya untuk terus berusaha hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi Ayah.

9. Kepada Abang dan Kakak, saya tidak tau harus mulai dari mana buat berterima kasih. Kakak dan abang bukan cuma jadi tempat cerita dan keluh kesah, tapi juga selalu ada, baik lewat dukungan emosional maupun bantuan materiil yang selama ini diam-diam sangat membantu penulis, meski mungkin nggak pernah benar-benar diucapkan secara langsung. Setiap kali penulis merasa capek dan hampir menyerah, kalian selalu jadi alasan untuk bangkit lagi. Terima kasih sudah selalu percaya sama saya, bahkan di saat saya sendiri ragu bisa sampai di titik ini. Semoga suatu hari nanti saya bisa membalas semua kebaikan kalian, sekecil apa pun itu.
10. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
11. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, diskusi, serta semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kebersamaan kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya.
12. Terakhir, saya berterima kasih kepada diri sendiri Nailul Muna, gadis yang selalu berusaha terlihat tegar, padahal di dalamnya menyimpan begitu banyak rapuh yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapa pun yang sudah berjuang dan bertahan sampai skripsi ini selesai. Banyak momen lelah, capek, bahkan sempat ragu apakah bisa menyelesaikan semua ini, tapi ternyata bisa juga sampai di titik ini. Terima kasih sudah tetap bertahan, terus mencoba, meskipun banyak tantangan yang dihadapi selama proses penyusunan skripsi ini, baik yang terlihat maupun yang hanya bisa dirasakan sendiri. Selamat untuk diri sendiri yang sudah berhasil melewati salah satu fase penting dalam hidup. Semoga ke depannya bisa terus lebih baik lagi, dan semoga banyak hal-hal baik berdatangan setelah ini.

Banda Aceh, 25 Agustus 2026

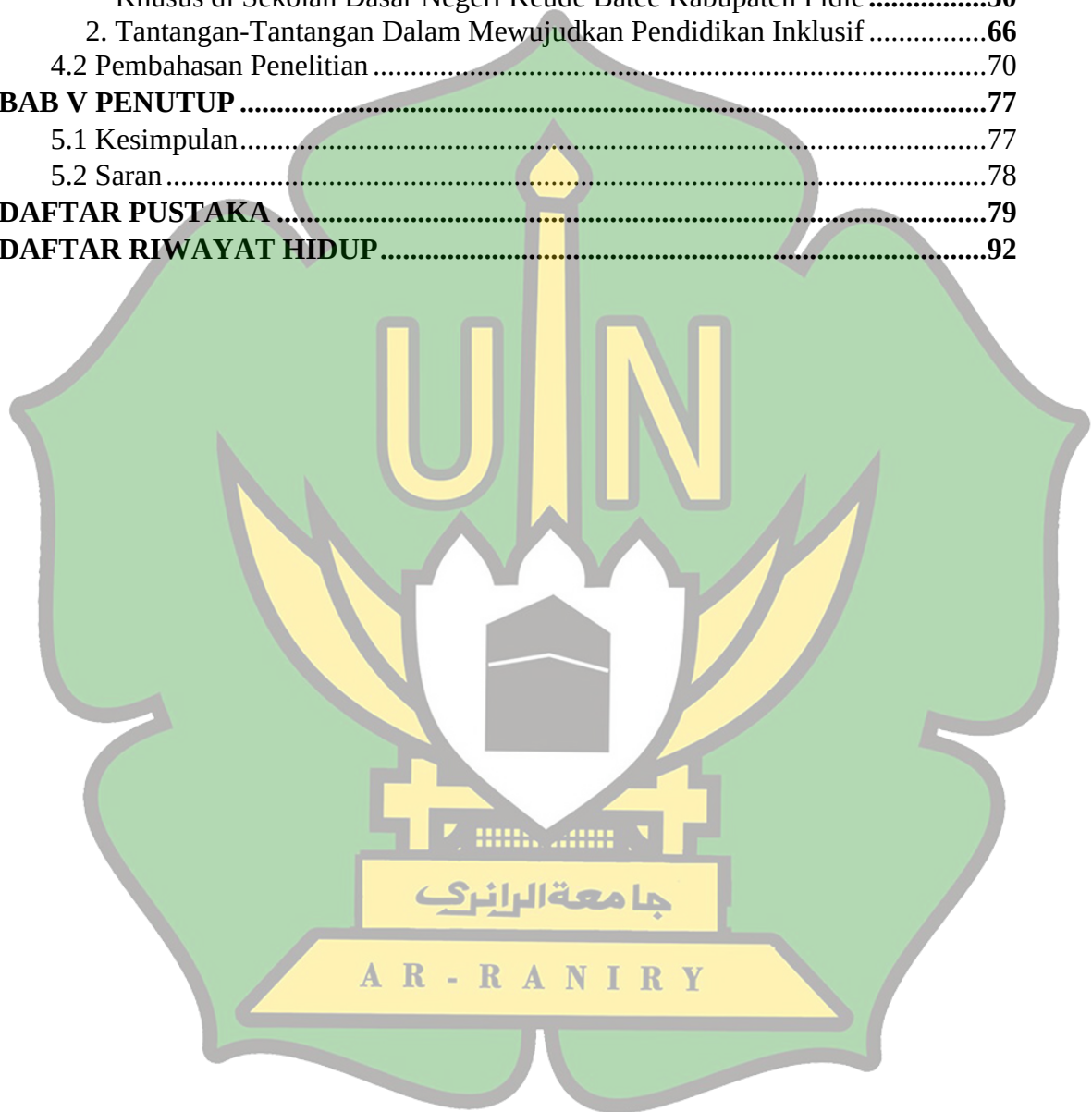
A R - R A N I R Y

Nailul Muna
220802116

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik	12
2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik	13
2.1.3 Ruang Lingkup Kebijakan Publik dan Jenis Kebijakan Publik	14
2.1.4 Teori Implementasi Kebijakan	16
2.1.5 Teori Pendidikan	18
2.1.6 Teori Pendidikan Inklusif	21
2.1.7 Anak Berkebutuhan Khusus	24
2.1.8 Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus	25
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Berfikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian	33
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.4 Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Informan Penelitian	37
3.7 Teknik Keabsahan Data	38
3.8 Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Kondisi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Negeri Keude Batee Kabupaten Pidie	41

4.1.2 Gambaran Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar Negeri	
Keude Batee Kabupaten Pidie	45
4.1.3 Hasil Penelitian	50
1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Anak Berkebutuhan	
Khusus di Sekolah Dasar Negeri Keude Batee Kabupaten Pidie	50
2. Tantangan-Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif	66
4.2 Pembahasan Penelitian	70
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Lima Pulau Terbesar di Indonesia Tahun 2026.....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. 1 Daftar Fokus Penelitian.....	34
Tabel 3.2 Daftar Informan penelitian	37
Tabel 4. 1 Kondisi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SDN Keude Batee Kabupaten Pidie	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Total Siswa Berkebutuhan Khusus Menurut Provinsi di Indonesia	4
Gambar 1.2 Kategori Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Menurut Provinsi Pada Pulau Sumatera Berdasarkan Ketunaan Tunggal dan Ketunaan Ganda.....	6
Gambar 1. 3 Grafik Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Provinsi Aceh Berdasarkan Ketunaan Tunggal Dan Ketunaan Ganda.....	7
Gambar 4. 1 Foto Siswa berkebutuhan Khusus di SDN Keude Batee	42
Gambar 4. 2 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Keude Batee	46
Gambar 4. 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie.....	48
Gambar 4. 4 ABK berbaur dengan murid reguler	54



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing.....	83
Lampiran 2 Pertanyaan Penelitian.....	84
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	89
Lampiran 4 Surat Izin Melakukan Penelitian.....	90
Lampiran 5 Dokumen Penelitian.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang wajib dijamin, tanpa memandang latar belakang, status sosial-ekonomi, atau kondisi fisik, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.¹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 5, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuannya.²

Dalam upaya memperluas dan pemeratakan akses pendidikan, pemerintah menetapkan percepatan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Wajib Belajar 13 Tahun mencakup satu tahun pendidikan prasekolah serta dua belas tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan secara berkelanjutan dan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun juga perlu memperhatikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan

¹Irawati and Susetyo, “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar.”

² Faiz, “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.”

pendidikan yang inklusif, sehingga kondisi dan kebutuhan khusus yang dimiliki anak tidak menjadi hambatan dalam memperoleh pendidikan yang setara.³

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan individu yang memiliki karakteristik atau kondisi tertentu, baik dari aspek fisik, mental, intelektual, emosional, maupun sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan layanan pendidikan yang khusus, guna mendukung tercapainya perkembangan secara optimal.⁴ Individu tersebut tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti anak-anak pada umumnya, tetapi juga membutuhkan layanan khusus, seperti terapi, pendidikan yang disesuaikan (kurikulum individual), serta alat bantu belajar atau mobilitas, dan pendampingan dari tenaga ahli.⁵ Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan yang berbeda dalam proses pendidikan dan layanan pembelajaran, hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan yang dialami individu tersebut pada satu atau lebih aspek perkembangan yang bersifat signifikan.⁶

Kemudian anak berkebutuhan khusus mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakannya dari anak-anak pada umumnya, anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan mental, emosional, atau fisik, Kategori ini mencakup berbagai kelompok, antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak dengan kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, serta anak yang memiliki permasalahan

³ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029*, 2025.

⁴ Mardiansah, Rizki Alvi Ramadhan, Reni Suryani, “Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus dan Klasifikasinya,” *Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, Vol.5, No. 1 February 2024

⁵ Rona Handayani, Wiwit Yusnida Ritonga, dan Maulida Hasnah Anas, “Konsep Pembelajaran Anak Inklusif dan Strategi Pembelajaran untuk Anak Inklusif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3 (2023)

⁶ Nisa, “Characteristics and Learning Needs of Children with Special Needs and Gifted Children.”

kesehatan.⁷ Umumnya, anak-anak tersebut mengikuti proses pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang disesuaikan dengan jenis kebutuhan khususnya atau di satuan pendidikan inklusif.⁸ Namun, menurut konsep pendidikan inklusif, sekolah umum juga harus mampu menerima dan memberikan layanan pendidikan kepada ABK melalui penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, ABK tetap dapat belajar bersama anak lainnya dalam lingkungan pendidikan yang setara dan tanpa diskriminasi.

ABK membutuhkan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.⁹ Dengan demikian, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, guru perlu memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai perbedaan yang ada di antara peserta didik.

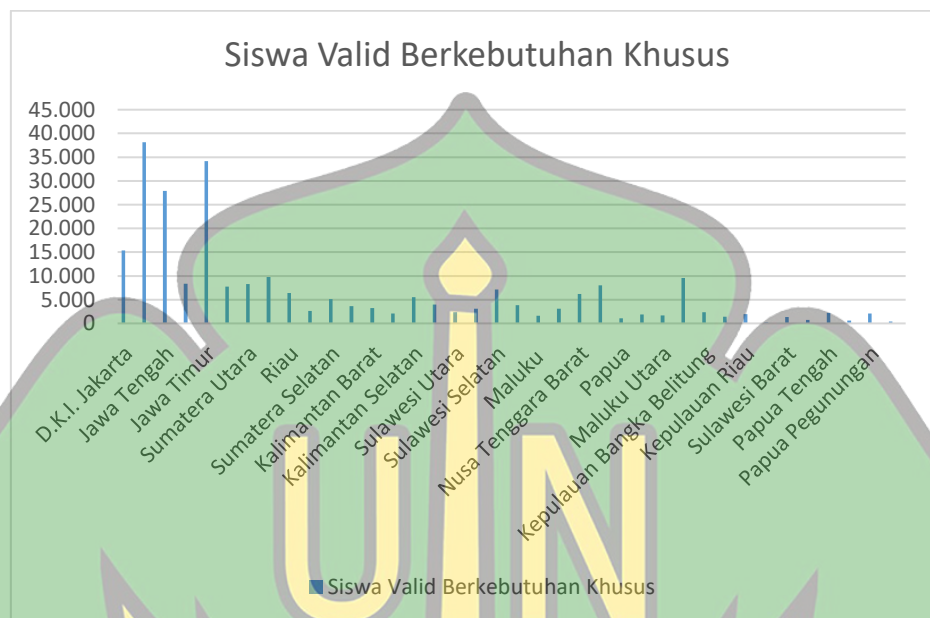
⁷ Mudjito, Herizal, Elfindri, & Wardi. (2012). Pendidikan Inklusif. Jakarta: "Baduose Media"

⁸ Mudjito, Harizal, Elfindri, & Wardi. (2012). Pendidikan Inklusif. Jakarta: Baduose Media

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

¹⁰ Daniel P. Hallahan dkk. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, (Boston: Pearson Education Inc., 2009), cet. ke-10, h. 53.

Gambar 1. 1 Total Siswa Berkebutuhan Khusus Menurut Provinsi di Indonesia



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Verval Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Tahun 2026

Berdasarkan Gambar 1.1 jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di Indonesia berbeda-beda di setiap provinsi. Beberapa provinsi memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebutuhan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus juga bervariasi di setiap daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan tersedianya fasilitas, tenaga pendidik, dan layanan pendidikan yang memadai agar setiap anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh hak pendidikan yang sama dan belajar dengan baik sesuai kebutuhannya. Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, penulis telah mengkategorisasikannya berdasarkan pulau terbesar di Indonesia, diperoleh hasil sebagai berikut.

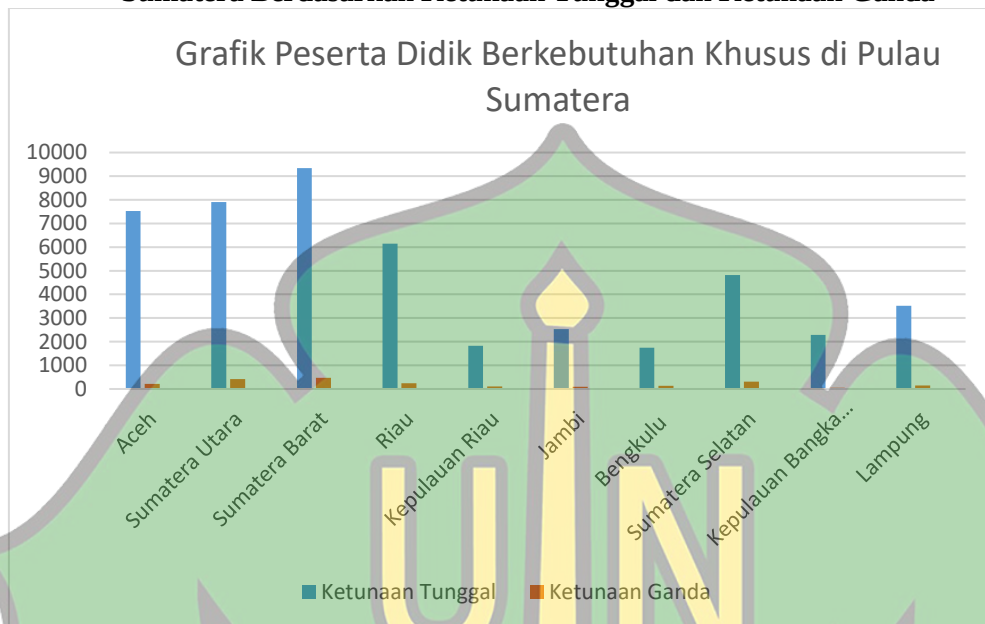
Tabel 1. 1 Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Lima Pulau Terbesar di Indonesia Tahun 2026

NO	Nama Pulau	Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus	Peringkat
1	Pulau Jawa	133.491	1
2	Sumatera	49.831	2
3	Sulawesi	19.235	3
4	Kalimantan	15.531	4
5	Papua	5.586	5

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Verval Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Tahun 2026

Tabel diatas menunjukkan bahwa pulau Jawa merupakan peringkat 1 dan Sumatera peringkat kedua jumlah anak berkebutuhan khusus paling banyak. Tingginya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan pendidikan inklusif di wilayah ini juga cukup besar. Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih rinci sebaran peserta didik berkebutuhan khusus pada setiap provinsi di Pulau Sumatera guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan kebutuhan pendidikan inklusif di kawasan tersebut, disajikan data pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1. 2 Kategori Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Menurut Provinsi Pada Pulau Sumatera Berdasarkan Ketunaan Tunggal dan Ketunaan Ganda

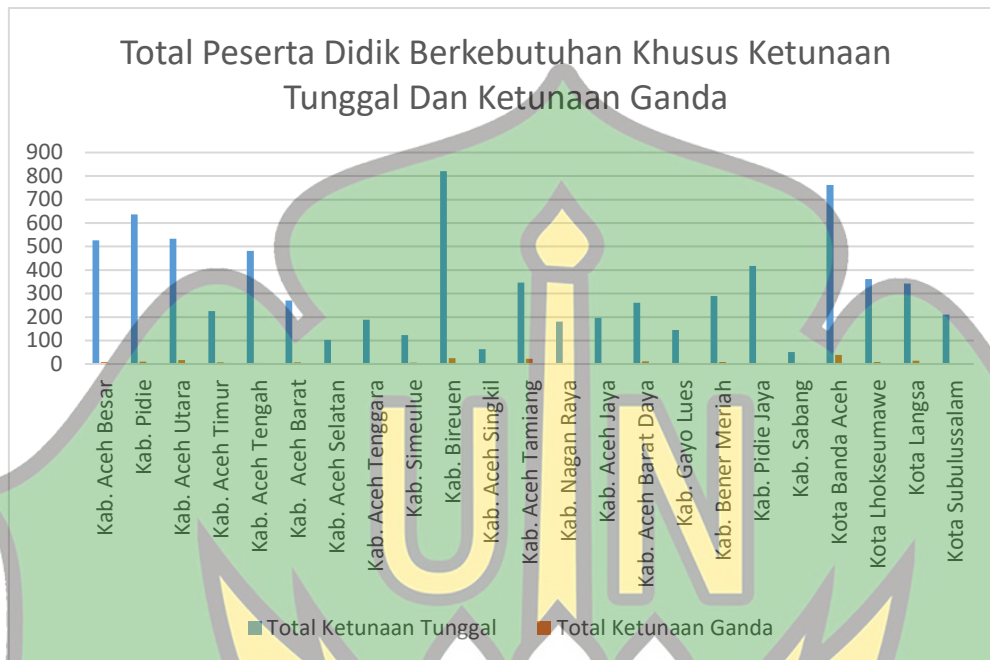


Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Verval Peserta Didik Berkebutuhan Khusus tahun 2026

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa provinsi paling banyak terdapat anak berkebutuhan khusus yaitu provinsi Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, dan Aceh berada di urutan ketiga. Kondisi anak berkebutuhan khusus di Aceh menunjukkan adanya peningkatan perhatian pemerintah terhadap pendidikan inklusif, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data tersebut, Aceh menjadi salah satu provinsi yang perlu mendapat perhatian karena memiliki jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang cukup besar, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pemerintah Aceh telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada ABK untuk belajar bersama peserta didik reguler di sekolah umum. Berikut grafik peserta didik berkebutuhan khusus Provinsi Aceh.

Gambar 1. 3 Grafik Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Provinsi Aceh Berdasarkan Ketunaan Tunggal Dan Ketunaan Ganda



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Verval Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Prov.Aceh 2026

Berdasarkan gambar 1.3 diatas terlihat bahwa Kabupaten Pidie berada di urutan ke 3 dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus 647 orang paling banyak setelah Kabupaten Bireun dan Banda Aceh. Kabupaten Pidie merupakan salah satu daerah di Aceh yang relatif lebih awal mengembangkan pendidikan inklusif. Kebijakan utama yang diadopsi adalah Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pidie. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan bagi ABK di sekolah reguler.

Kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Aceh terlegitimasi dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 menjelaskan bahwa Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusif dan/atau

pendidikan khusus di satuan pendidikan umum, kejuruan, maupun keagamaan. Setiap penyelenggara pendidikan dilarang menolak peserta didik penyandang disabilitas untuk menerima layanan pendidikan.¹¹ Pelaksanaan pendidikan inklusif di Pidie merujuk pada Peraturan Bupati Pidie Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pidie.

Kabupaten Pidie merupakan salah satu wilayah dengan cakupan area yang cukup luas di Provinsi Aceh, terdapat 23 kecamatan dan total 730 desa. Kemudian sesuai grafik 2 menunjukkan bahwa kabupaten pidie sebagai kabupaten ketiga tertinggi jumlah siswa berkebutuhan khusus. Hal ini menjadi alasan utama mengapa peneliti memilih daerah ini untuk melakukan penelitian terkait penerapan pendidikan inklusif.¹² Berdasarkan data verval peserta didik berkebutuhan khusus kabupaten pidie, tercatat ada 647 orang anak berkebutuhan khusus.¹³ Jumlah ini cukup besar dan menjadi perhatian bersama. Dengan wilayah yang sangat luas dan angka penduduk yang banyak, sudah semestinya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai untuk anak berkebutuhan khusus juga disediakan secara merata di berbagai kecamatan. Namun observasi awal peneliti menunjukkan masih belum terpenuhi sebagaimana mestinya.

Saat ini terdapat 91 sekolah inklusif di Kabupaten Pidie, 82 diantaranya merupakan sekolah dasar dan 9 sekolah menengah pertama.¹⁴ SDN Keudee Batee merupakan sekolah inti dan unggul yang menyediakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan mengimplementasikan kebijakan sekolah inklusif.¹⁵

¹¹ Qanun_aceh_nomor_2_tahun_2025_tentang_pemenuhan_hak_penyandang_disabilitas11 (2)Pdf.”

¹² Firdaus, “Ruang Dan Akses Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Pidie.”

¹³ Khusus, “Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Prov.Aceh.”

¹⁴ Saymima, “Pidie Didera Kekurangan Guru Pembimbing Khusus Di Sekolah-Sekolah Inklusi.”

¹⁵ Saymima, “Mengarusutamakan Pendidikan Inklusif.”

Adapun saat ini terdapat 200 murid yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 serta terdapat 10 anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwasanya penerapan sistem inklusif di sekolah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang dimana belum terdapat fasilitas dan tenaga pendidik untuk anak yang berkebutuhan khusus di SDN Keude Batee. Tenaga pendidiknya hanya terdiri dari guru reguler biasa tidak ada tenaga pendidik khusus, begitupun dengan fasilitasnya tidak ada yang membedakan dengan anak yang normal.

Dengan demikian, Penelitian ini sangat penting terutama dalam upaya memastikan hak-hak anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Pidie. Meskipun terdapat dasar hukum yang mendukung pendidikan inklusif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait fasilitas dan sumber daya manusia yang tidak memadai. Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif serta untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh SDN Keude Batee dalam memberikan layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemangku kepentingan seperti Dinas Pendidikan, untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Negeri Keude Batee Kabupaten Pidie”.

¹⁶ Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingginya jumlah siswa berkebutuhan khusus di Kabupaten Pidie yang menempati urutan ketiga terbanyak di Aceh menimbulkan persoalan dalam pemenuhan akses dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.
2. Belum optimalnya dukungan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee, khususnya dalam penyediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus di SDN Keude Batee Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana tantangan-tantangan dalam mewujudkan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Keude Batee Kabupaten Pidie
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Keudee Batee Kabupaten Pidie

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah
Memberikan pengetahuan yang mendalam untuk memperbaiki kebijakan pendidikan inklusif dan alokasi sumber daya bagi anak berkebutuhan khusus.

2. Bagi Akademisi

Menambah literatur tentang pendidikan inklusif dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya di bidang ini.

3. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran tentang hak anak berkebutuhan khusus dan pentingnya dukungan terhadap pendidikan inklusif



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson yang dikutip oleh Leo Agustino, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berkaitan dengan isu atau hal yang menjadi perhatian.¹⁷ Richard Rose mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan yang saling terkait, baik yang banyak maupun sedikit, yang memiliki dampak bagi para pemangku kepentingan sebagai keputusan yang berbeda.¹⁸

Menurut Anderson dikutip oleh Leo Agustino, kebijakan publik merupakan "sekumpulan tindakan yang memiliki tujuan atau maksud tertentu, yang diikuti dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang terkait dengan isu atau aspek yang menjadi perhatian."¹⁹ Menurut Frederich dikutip oleh Leo Agustino, kebijakan publik adalah "serangkaian usulan yang diajukan oleh individu atau sekelompok pemerintah dalam konteks tertentu, yang menyediakan berbagai hambatan dan peluang terkait dengan usulan kebijakan untuk digunakan dan diatasi demi mencapai tujuan atau merealisasikan sasaran tertentu."²⁰

¹⁷ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 17

¹⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014), hlm. 21

¹⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 7.

²⁰ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 7–8.

Berdasarkan pengertian diatas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai rangkaian keputusan serta hasil akhir yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga publik demi mewujudkan sasaran masyarakat tertentu. Di dalamnya terdapat tindakan nyata yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan umum, memajukan kesejahteraan warga, serta mengatur penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif.

2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan publik melibatkan tahapan yang rumit dalam prosesnya, karena memerlukan berbagai variabel yang mendukung penentuan kebijakan tersebut. Untuk memudahkan dalam mengkaji suatu kebijakan publik, maka dibuatlah beberapa tahapan kebijakan publik. Menurut William Dun dalam penelitian yang dilakukan oleh sopan aji wibowo, tahapan kebijakan publik terdiri atas:

1. Penyusunan Agenda, adalah langkah untuk menjadikan suatu masalah sebagai agenda publik yang dikerjakan oleh para pejabat. Di sini, masalah-masalah yang telah dipilih sebelumnya dirumuskan. Dalam tahap ini, ada Malang kemungkinan beberapa masalah tidak dibahas, sementara ada juga masalah lainnya yang dipilih untuk menjadi fokus diskusi.
2. Formulasi kebijakan, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Mereka akan menentukan cara untuk memecahkan masalah tersebut.
3. Adopsi Kebijakan, Pada tahap ini dilakukan pemilihan dari berbagai solusi atau alternatif kebijakan yang diusulkan oleh para perumus. Dari semua opsi tersebut,

akan dipilih satu yang diadopsi dengan dukungan dari lembaga legislatif, berdasarkan kesepakatan bersama.

4. Implementasi kebijakan, keputusan mengenai program yang telah dipilih sebagai solusi untuk masalah harus dilaksanakan oleh badan administratif atau lembaga pemerintah lainnya. Sebab, jika program yang telah dirancang tidak diimplementasikan, maka hanya akan menjadi catatan tanpa makna bagi para birokrat.
5. Evaluasi kebijakan publik, kebijakan yang sudah dilaksanakan akan dianalisis untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menyelesaikan permasalahan. Penilaian ini dilakukan menggunakan indikator tertentu untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.²¹

2.1.3 Ruang Lingkup Kebijakan Publik dan Jenis Kebijakan Publik

Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas, mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Selain itu, dari segi hierarkinya, kebijakan publik bisa bersifat nasional, regional, atau lokal, seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati atau Walikota.²²

Menurut Kristian dalam jurnalnya, ia menyebutkan bahwa kebijakan public tergantung pada kriteria klasifikasinya dan kebijakan publik terdiri dari berbagai jenis.

²³Adapun jenis-jenis kebijakan publik adalah sebagai berikut:

²¹ Kasmad and Terbuka, "Implementasi Kebijakan Publik."

²² Suharno, "Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)."

²³ Pramono, "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia."

1. Kebijakan distributif, Kebijakan ini melibatkan alokasi sumber daya secara adil kepada berbagai sektor dan individu. Manfaat yang diberikan harus bersifat netral dan adil, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bagian yang wajar.
2. Kebijakan Redistributif, yaitu mengalihkan keuntungan dari satu individu atau sektor ke yang lain, yang bisa mengancam kelompok lain. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketidaksetaraan, tetapi sering menyebabkan konflik.
3. Kebijakan peraturan, menetapkan standar untuk membatasi aktivitas dalam masyarakat yang bertujuan untuk mencegah dampak negatif.
4. Kebijakan ekstraktif, bertujuan mengambil sumber daya seperti uang dan barang dari dalam dan luar negeri. Fokus pemerintah seharusnya pada penciptaan peluang produksi, bukan hanya distribusi. Kebijakan ini meningkatkan kemampuan individu dan institusi, seperti penciptaan lapangan kerja dan program keterampilan.
5. Kebijakan simbolis, bertujuan mempromosikan perilaku tertentu melalui penghargaan yang mendorong warga untuk bertindak sesuai harapan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membangun kebersamaan dan identitas bersama.

2.1.4 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah kebijakan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan memberikan hasil apabila tidak dilaksanakan secara tepat oleh pihak-pihak yang menjadi pelaksana. Dengan demikian, implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan suatu program, tetapi juga mencakup bagaimana tujuan kebijakan diterjemahkan, sumber daya digunakan, serta bagaimana para pelaksana menjalankan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁴

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap pelaksana (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah suatu kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Edwards III menjelaskan bahwa komunikasi yang tidak jelas, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana yang kurang mendukung, serta struktur birokrasi yang tidak sesuai dapat menjadi faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.²⁵

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

²⁴ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 681.

²⁵ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 9–10.

Informasi yang diberikan harus jelas, tepat, dan konsisten agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di antara para pelaksana. Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, komunikasi dapat dilihat dari bagaimana pemerintah daerah menyampaikan kebijakan kepada pihak sekolah, kepala sekolah, guru, maupun pihak lain yang terlibat. Kejelasan mengenai tujuan, aturan, tugas, serta bentuk layanan bagi anak berkebutuhan khusus akan membantu sekolah memahami apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.²⁶

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tidak hanya berupa anggaran, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana, serta berbagai fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Dalam penelitian ini, sumber daya dapat dilihat dari ketersediaan guru yang mampu menangani anak berkebutuhan khusus, keberadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK), fasilitas pembelajaran, alat bantu belajar, serta dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah daerah. Apabila sumber daya yang tersedia tidak memadai, pelaksanaan pendidikan inklusif akan sulit berjalan secara optimal meskipun kebijakan telah ditetapkan.²⁷

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition)

Disposisi berkaitan dengan sikap, kemauan, komitmen, dan kecenderungan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Pelaksana kebijakan tidak cukup hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga perlu memiliki kemauan untuk

²⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 177.

²⁷ Zaini Sudarto, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif," *Jurnal Pendidikan: Teori dan Praktik* 1, no. 1 (2016): 97–106.

melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam konteks pendidikan inklusif, disposisi dapat terlihat dari sikap kepala sekolah dan guru dalam menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus, memberikan pendampingan, melakukan penyesuaian pembelajaran, serta menciptakan lingkungan sekolah yang tidak diskriminatif. Sikap positif dari pelaksana menjadi salah satu faktor penting agar kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya berhenti pada aturan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan sekolah sehari-hari.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, kewenangan, prosedur, serta mekanisme kerja yang digunakan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Struktur yang jelas dapat membantu pelaksana mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lebih terarah. Sebaliknya, struktur dan prosedur yang tidak jelas dapat menimbulkan tumpang tindih tugas serta menghambat koordinasi. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi dapat dilihat dari pembagian tanggung jawab antara Dinas Pendidikan, pihak sekolah, kepala sekolah, guru, dan pihak lain dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk ada atau tidaknya pedoman dan prosedur yang menjadi acuan sekolah dalam menangani anak berkebutuhan khusus.²⁸

2.1.5 Teori Pendidikan

1. Pendidikan formal (Normatif)

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pengetahuan, tetapi

²⁸ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980).

juga mencakup pembentukan sikap, kepribadian, keterampilan, serta kemampuan peserta didik dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus memberikan ruang kepada setiap peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan berbagai kemampuan peserta didik, baik dalam aspek spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak, maupun keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁹

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencapaian akademik. Proses pendidikan juga perlu memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Setiap peserta didik memiliki kemampuan, karakteristik, latar belakang, dan kebutuhan yang berbeda sehingga proses pendidikan perlu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk berkembang.

Sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, pendidikan merupakan proses menuntun segala kekuatan kodrat yang terdapat pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pandangan tersebut menempatkan peserta didik sebagai

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1 ayat (1).

individu yang memiliki potensi untuk berkembang, sedangkan pendidik berperan memberikan tuntunan dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan tersebut.

Pendidikan formal pada dasarnya Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan secara sistematis, terstruktur, dan berjenjang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jalur ini terdiri atas tiga jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang masing-masing diselenggarakan di lembaga pendidikan resmi seperti sekolah, madrasah, atau perguruan tinggi, dengan mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan secara berjenjang dari tingkat paling dasar hingga tingkat lanjut. Jalur ini berbeda dengan pendidikan nonformal, yang berlangsung di luar sistem persekolahan formal namun tetap bisa terstruktur seperti kursus atau bimbingan belajar, serta pendidikan informal, yang berlangsung secara alami melalui keluarga dan lingkungan sehari-hari. Dalam konteks pemenuhan hak penyandang disabilitas, seperti yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025, akses terhadap pendidikan formal ini menjadi salah satu hak yang wajib dijamin, termasuk melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah umum agar penyandang disabilitas dapat mengenyam pendidikan dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi setara dengan warga negara lainnya.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan perlu diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Prinsip tersebut menjadi penting karena lingkungan pendidikan terdiri atas peserta didik dengan kondisi dan kemampuan yang beragam. Perbedaan kemampuan tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi kesempatan seseorang dalam memperoleh pendidikan. Sebaliknya, perbedaan tersebut perlu direspons

melalui penyelenggaraan pembelajaran dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

2.1.6 Teori Pendidikan Inklusif

Teori pendidikan inklusif yang dikembangkan oleh Tony Booth dan Mel Ainscow merupakan salah satu pendekatan paling komprehensif dalam memahami pendidikan inklusif. Konsep ini dikenal sebagai Index for Inclusion, yaitu suatu kerangka kerja yang dirancang untuk membantu sekolah dalam mengembangkan praktik pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik tanpa diskriminasi³⁰

Index for Inclusion menekankan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang memberikan akses kepada anak berkebutuhan khusus (ABK), tetapi juga tentang menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghilangkan hambatan belajar dan partisipasi bagi semua siswa. Dengan demikian, inklusi dipahami sebagai proses berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.³¹

Menurut Booth dan Ainscow, pendidikan inklusif berfokus pada tiga aspek utama yaitu kehadiran (presence), partisipasi (participation), dan pencapaian (achievement) siswa dalam proses pendidikan. Ketiga aspek ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana sekolah telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip inklusif.³²

Pendekatan ini menggeser paradigma tradisional yang melihat hambatan belajar sebagai masalah individu menjadi perspektif baru yang menekankan bahwa hambatan tersebut berasal dari sistem pendidikan itu sendiri, seperti kurikulum yang tidak fleksibel,

³⁰ Sulistyaningsih and Handayani, "Analisis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Index for Inclusion."

³¹ Jauhari, "Menggunakan Instrumen Indeks for Inclusion."

³² Tony Booth & Mel Ainscow, *The Index for Inclusion: A Guide to School Development Led by Inclusive Values*, (Bristol: CSIE, 2016)

metode pembelajaran yang tidak adaptif, serta lingkungan sekolah yang kurang mendukung.³³ Dalam implementasinya, Booth dan Ainscow membagi pendidikan inklusif ke dalam tiga dimensi utama, yaitu budaya inklusif (*inclusive culture*), kebijakan inklusif (*inclusive policy*), dan praktik inklusif (*inclusive practice*). Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam mengembangkan sekolah yang inklusif.³⁴

1. Budaya Inklusif (*inclusive culture*)

Budaya inklusif merupakan fondasi utama dalam pendidikan inklusif karena berkaitan dengan nilai, keyakinan, sikap, dan hubungan sosial yang berkembang dalam lingkungan sekolah. Tanpa budaya yang mendukung, kebijakan dan praktik inklusif tidak akan berjalan secara efektif. Budaya inklusif menekankan pada penciptaan komunitas sekolah yang aman, ramah, dan menghargai keberagaman, di mana setiap individu merasa diterima tanpa diskriminasi. Dalam Index for Inclusion, indikator ini mencakup dua aspek utama, yaitu membangun komunitas (*building community*) dan menanamkan nilai inklusif (*establishing inclusive values*). Adapun budaya inklusif tercermin dalam beberapa aspek:

- a. Hubungan yang harmonis antara guru, siswa, dan seluruh warga sekolah
 - b. Adanya rasa saling menghargai perbedaan latar belakang, kemampuan, dan kondisi siswa
 - c. Lingkungan sosial yang bebas dari stigma, label negatif, dan diskriminasi
- Adanya rasa kepemilikan bersama terhadap sekolah

³³ Mel Ainscow, *Understanding the Development of Inclusive Education System*, Journal of Research in Special Educational Needs, 2005.

³⁴ Sulistiyaningsih and Handayani, "Analisis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Index for Inclusion."

2. Kebijakan Inklusif (*inclusive policy*)

Kebijakan inklusif merupakan kerangka struktural dan regulatif yang dirancang untuk memastikan bahwa prinsip inklusi dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendidikan. Kebijakan ini mencakup aturan, program, serta mekanisme yang mendukung keberagaman peserta didik. Dalam Index for Inclusion, kebijakan inklusif meliputi dua fokus utama, yaitu mengembangkan sekolah untuk semua (*developing school for all*) dan mengorganisasi dukungan terhadap keberagaman (*organising support for diversity*). Kebijakan inklusif memiliki peran penting dalam:

- a. Menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua siswa tanpa diskriminasi
- b. Mengatur sistem penerimaan siswa yang terbuka dan adil
- c. Menyediakan dukungan khusus bagi siswa yang membutuhkan
- d. Mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan adaptif

3. Praktik Inklusif (*inclusive practice*)

Praktik inklusif merupakan implementasi nyata dari pendidikan inklusif dalam proses pembelajaran sehari-hari. Indikator ini berfokus pada bagaimana guru mengajar, bagaimana siswa belajar, serta bagaimana interaksi terjadi di dalam kelas. Dalam kerangka Index for Inclusion, praktik inklusif mencakup dua aspek utama, yaitu mengelola pembelajaran (*orchestrating learning*) dan mengoptimalkan sumber daya (*mobilising resources*). Praktik inklusif menuntut adanya pembelajaran yang:

- a. Responsif terhadap keberagaman siswa
- b. Menggunakan metode yang fleksibel dan variatif
- c. Mendorong partisipasi aktif seluruh siswa

- d. Menyesuaikan penilaian dengan kemampuan individu

2.1.7 Anak Berkebutuhan Khusus

Anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan dukungan khusus agar memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang meliputi akses terhadap pendidikan, layanan sosial, bimbingan, konseling, serta berbagai macam layanan khusus lainnya. Heward mendefinisikan anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagai individu yang memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari anak-anak lainnya, tanpa harus menunjukkan ketidakmampuan dalam aspek mental, emosional, atau fisik. Di sisi lain, Anak-anak tersebut memperlihatkan perbedaan dibandingkan dengan teman sebaya mereka, dengan adanya kelainan atau penyimpangan pada berbagai aspek, termasuk fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional.³⁵ Klasifikasi anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:

1. Tunanetra: Merujuk pada individu yang mengalami kehilangan fungsi indera penglihatan.
2. Tunarungu: Merupakan suatu kondisi di mana individu mengalami penurunan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik secara parsial maupun total.
3. Tunadaksa: Merujuk pada individu yang mengalami kelainan ortopedik atau gangguan fungsi pada tulang, otot, dan persendian, yang dapat disebabkan oleh faktor bawaan, penyakit, atau kecelakaan, sehingga membutuhkan alat bantu untuk mobilitas atau berjalan.
4. Tunawicara: Mencakup ketidakmampuan individu untuk berkomunikasi secara verbal.

³⁵ Supitno et al., "Pendidikan Inklusi."

5. Autisme: Dikenali anak dengan gangguan perkembangan yang disebabkan oleh kelainan pada sistem saraf pusat.
6. Anak tunalaras: Merupakan anak yang mengalami gangguan perilaku dan memberikan respons yang jelas tidak dapat diterima secara sosial.
7. Tunagrahita: Merupakan individu yang mengalami hambatan signifikan dalam perkembangan mental dan intelektual, sehingga kemampuan kognitifnya berada di bawah rata-rata.
8. Anak berbakat: Merupakan anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab yang melampaui kemampuan anak seusianya, sehingga memerlukan layanan khusus untuk mengembangkan potensinya menjadi prestasi yang nyata.³⁶

2.1.8 Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi atau keterbatasan yang dimiliki tidak seharusnya menjadi alasan bagi seorang anak untuk tidak memperoleh kesempatan belajar. Oleh karena itu, pendidikan bagi ABK perlu diberikan dengan memperhatikan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan masing-masing anak. Pendidikan inklusif menjadi salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada ABK agar dapat memperoleh pendidikan bersama dengan peserta didik lainnya.

1. Hak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi

Setiap anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya

³⁶Sri Widiati dkk. (2013). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: PT Luxima Metri Media

perlakuan yang berbeda atau diskriminasi. Kondisi fisik, intelektual, mental, sensorik, maupun kondisi lainnya tidak boleh menjadi alasan bagi sekolah untuk menolak ABK. Sekolah perlu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Anzari, Sarong, dan Rasyid yang menjelaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.³⁷

2. Hak mendapatkan kesempatan belajar yang sama

ABK berhak memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kesempatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan di sekolah, tetapi juga mencakup kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran dan berbagai kegiatan sekolah. Pendidikan inklusif memberikan ruang bagi ABK untuk belajar bersama peserta didik lainnya dalam lingkungan sekolah yang sama.³⁸

3. Hak mendapatkan pembelajaran sesuai kebutuhan

Setiap ABK mempunyai kondisi, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pembelajaran yang diberikan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Penyesuaian dapat dilakukan melalui metode mengajar, materi pembelajaran, penggunaan media, pemberian tugas, maupun bentuk penilaian. Penyesuaian tersebut diperlukan agar ABK dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

4. Hak mendapatkan pendampingan

³⁷ Mudhafar Anzari, A. Hamid Sarong, dan M. Nur Rasyid, "Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 1 (2018): 57–73.

³⁸ Wiwi Purnama Dewi, Sudadio, dan Fadlullah, "Implementasi Pendidikan Inklusif pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Jenjang SMP di Kota Tangerang," *Journal of Education Research* 5, no. 1 (2024).

ABK juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan selama mengikuti proses pendidikan. Pendampingan diperlukan bagi anak yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran, berkomunikasi, berinteraksi, maupun melakukan aktivitas tertentu di sekolah. Dukungan dari guru dan tenaga pendidik diperlukan agar ABK dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengembangkan kemampuannya secara optimal.

5. Hak mendapatkan fasilitas yang sesuai

ABK berhak mendapatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Fasilitas tersebut dapat berupa alat bantu belajar, media pembelajaran, maupun fasilitas lain yang dapat membantu anak mengikuti kegiatan pendidikan. Penelitian mengenai pemenuhan hak ABK di sekolah dasar di Banda Aceh menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas dan layanan pendukung menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi ABK.³⁹

6. Hak mendapatkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman

ABK berhak memperoleh lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan dapat menerima keberadaan mereka. Sekolah perlu menciptakan suasana yang membuat ABK merasa diterima oleh guru maupun teman-temannya. Lingkungan sekolah yang inklusif juga perlu memberikan perlindungan kepada ABK dari diskriminasi dan perlakuan yang dapat menghambat proses belajar maupun perkembangan sosialnya.

7. Hak mengikuti kegiatan sekolah

ABK tidak hanya berhak mengikuti pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sekolah lainnya. Keterlibatan

³⁹ Oetari Nurkamila, Fadhillah, dan Faisal Anwar, “Analisis Implementasi Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus,” Jurnal Seramoe Education 2, no. 2 (2025): 423–436.

dalam kegiatan sekolah dapat membantu ABK mengembangkan kemampuan sosial, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun hubungan dengan peserta didik lainnya. Dengan demikian, ABK dapat menjadi bagian dari lingkungan sekolah dan tidak merasa terpisah dari peserta didik lainnya.⁴⁰

8. Hak mengembangkan kemampuan dan potensi

Setiap ABK memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan tersebut, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Pendidikan bagi ABK seharusnya tidak hanya berfokus pada keterbatasan yang dimiliki, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan melalui layanan pendidikan yang sesuai.⁴¹

⁴¹ Siti Maria Rahayu, "Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Inklusif," *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 2, No. 2 (2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1.	Rika Melati Ana /2023 ⁴²	Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di SD Darul Falah Cibinong	Menganalisis implementasi pendidikan inklusif dan dampaknya.	Implementasi kebijakan	Kualitatif deskriptif	Berjalan cukup baik, terkendala sarana	Belum mengkaji faktor spesifik di daerah
2.	Teni Susanti, Nenden Ineu Herawati /2024 ⁴³	Implementasi Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar Kabupaten Bandung Barat	Menilai implementasi inklusif di sekolah dasar	Pendidikan inklusif	Kualitatif	Belum optimal guru, dana, fasilitas terbatas	Belum fokus pada perspektif kebijakan daerah
3.	Chairul Anwar, Laili Komariyah, Ahmad Aznem, Hasbar, Lidyawati	Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di	Mengevaluasi kebijakan inklusif nasional	Keadilan social	Kualitatif (literatur)	Implementasi lemah pada input dan proses	Belum berbasis studi lapangan.

⁴² Rika Melati Ana. 2023. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sd Plus Darul Fudlola Cibinong." Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

⁴³ Teni susanti, Nenden Ineu Herawati, 2024. "Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Bandung Barat". *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 2(1), 64-72.

	Tandi Payung, Agus Heri, Kesuma / 2025 ⁴⁴	Indonesia: Pendekatan CIPP Dan Perspektif Keadilan Sosial					
4.	Salsabila Feby Sakinah, Hendry Andry /2024 ⁴⁵	Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) TINGKAT Sekolah Dasar Penggerak Kota Pekanbaru	Mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan inklusif	Implementasi kebijakan	Kualitatif Deskriptif	Belum maksimal (kompetensi dan sarana terbatas)	Belum fokus pada studi kasus spesifik
5.	Randy Fadillah Gustaman, Agus Gandhi, Nani Ratnaningsih / 2025 ⁴⁶	Implementasi Pendidikan Inklusif Dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak	Mengkaji implementasi pendidikan inklusif untuk sekolah ramah anak.	Literature Riview	kualitatif	Terhambat sumber daya	Belum kajian empiris disekolah.

⁴⁴ Chairul Anwar, Laili Komariyah, Ahmad Aznem, Hasbar, Lydiawati Tandi Payung, Agus Heri Kesuma, "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Indonesia : Pendekatan CIPP Dan Perspektif Keadilan Sosial." *Journal Of Education Research*, 6(3), 739-750.

⁴⁵ Salsabila Feby Sakinah, Hendry Andry. 2024. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tingkat Sekolah Dasar Penggerak Kota Pekanbaru. *Journal Of Public Administration Review*, 1 (1), 628-638.

⁴⁶ Randy fadillah gustaman, agus gandi, nani ratnaningsih. 2025.

Gap Penelitian

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terlihat adanya perbedaan fokus yang membentuk gap penelitian ini. Penelitian Rika Melati Ana menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, namun belum membahas secara rinci faktor-faktor penyebabnya di daerah tertentu, sedangkan penelitian ini lebih fokus mengkaji kondisi tersebut secara spesifik di Kabupaten Pidie.⁴⁷ Begitu pula penelitian Teni Susanti dan Nenden Ineu Herawati membahas implementasi pendidikan inklusif secara umum, tetapi belum melihatnya dari sudut pandang administrasi publik dan peran pemerintah daerah, yang justru menjadi perhatian dalam penelitian ini.⁴⁸

Selanjutnya, penelitian Chairul Anwar dkk hanya menggunakan kajian pustaka sehingga belum menggambarkan kondisi nyata di sekolah, sementara penelitian ini dilakukan langsung di lapangan.⁴⁹ Selain itu penelitian Salsabila Feby Sakinah dan Hendry Andry juga masih bersifat umum dan belum mendalami satu sekolah secara khusus, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di SDN Keude Batee.⁵⁰ Terakhir, penelitian Randy Fadillah Gustaman dkk lebih bersifat teori, belum melihat praktik secara langsung, berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji kondisi nyata.⁵¹

⁴⁷ Rika Melati Ana. 2023. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sd Plus Darul Fudlola Cibirong*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

⁴⁸ Teni Susanti, Nenden Ineu Herawati, "Implementasi Pendidikan Inklusif Disekolah Dasar Kabupaten Bandung Barat."

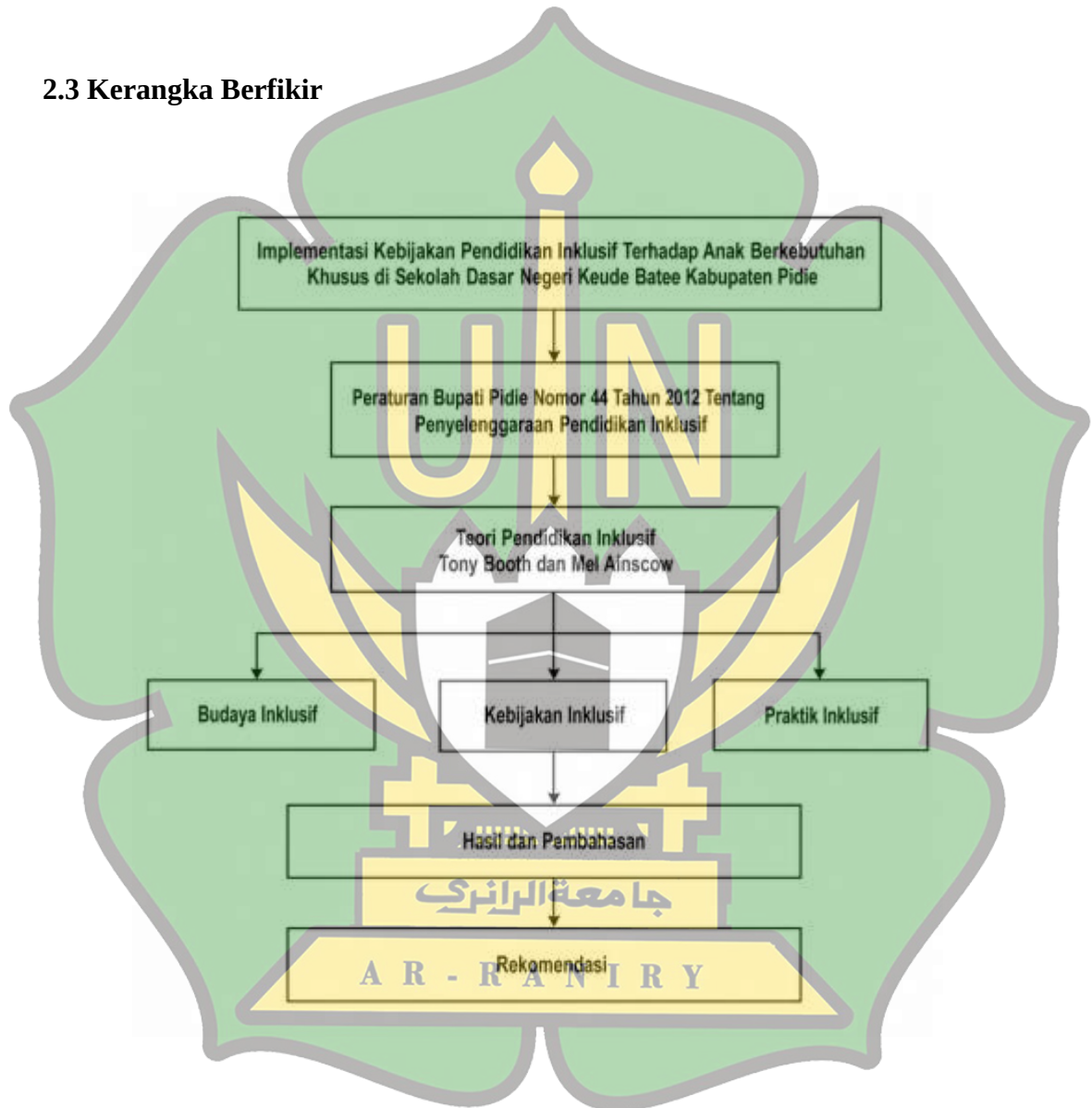
⁴⁹ Chairul Anwar, Laili Komariyah, Ahmad Aznem, Hasbar, Lydiawati Tandi Payung, Agus Heri Kesuma, "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Pendekatan CIIP Dan Perspektif Keadilan Sosial."

⁵⁰ Salsabila Feby Sakinah, Hendry Andry, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tingkat Sekolah Dasar Penggerak Kota Pekanbaru."

⁵¹ Randy Fadillah Gustaman, Agus Gandi, Nani Ratnaningsih, "Implementasi Pendidikan Inklusif Dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak."

Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan memberikan gambaran yang lebih spesifik, nyata, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (single case study). Menurut Moleong Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena tertentu, seperti perilaku dan persepsi subjek yang diteliti.⁵² Metode ini menggambarkan masalah yang terjadi pada subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, dan motivasi mereka.⁵³ Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini hanya berfokus pada satu kasus, yaitu pelaksanaan pendidikan inklusif pada satu sekolah, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang rinci mengenai budaya inklusif, kebijakan inklusif, praktik inklusif, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat implementasi kebijakan pendidikan inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus di SDN Keude Batee Kabupaten Pidie. Penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana kebijakan pendidikan inklusif dilaksanakan dalam memberikan kesempatan dan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, mulai dari penerimaan peserta didik, proses pembelajaran, peran guru, penyediaan fasilitas pendukung, hingga upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang dapat menerima dan menghargai keberagaman peserta didik.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 6.

⁵³ Martadinata et al, 2022

Penelitian ini juga memfokuskan perhatian pada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee Kabupaten Pidie. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan guru pembimbing khusus, kemampuan dan pemahaman guru dalam menangani kebutuhan yang beragam, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta kendala dalam menerapkan kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah. Fokus tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif sekaligus mengidentifikasi berbagai permasalahan yang memengaruhi pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Tabel 3. 1 Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Pendidikan inklusif	1. Budaya inklusif 2. Kebijakan inklusif 3. Praktik inklusif	⁵⁴ Tony Booth & Mel Ainscow, <i>The Index for Inclusion: A Guide to School Development Led by Inclusive Values</i> , (Bristol: CSIE, 2016).

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di SDN Keudee Batee yang merupakan salah satu sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusif di Kabupaten Pidie.

⁵⁴ Tony Booth & Mel Ainscow, *The Index for Inclusion: A Guide to School Development Led by Inclusive Values*, (Bristol: CSIE, 2016).

Peneliti memilih kabupaten Pidie untuk diteliti dikarenakan Kabupaten Pidie merupakan salah satu wilayah dengan cakupan area yang cukup luas di Provinsi Aceh, terdapat 23 kecamatan dan total 730 desa. Kemudian sesuai grafik 2 menunjukkan bahwa kabupaten pidie sebagai kabupaten ketiga tertinggi jumlah siswa berkebutuhan khusus. Hal ini menjadi alasan utama mengapa peneliti memilih daerah ini untuk melakukan penelitian terkait penerapan pendidikan inklusif.

3.4 Sumber Data

Data meliputi seluruh informasi yang berkaitan dengan individu yang berperan sebagai responden, serta berbagai informasi yang diperoleh dari dokumen, baik berupa data statistik maupun bentuk lainnya, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Jenis dan sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi atas data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, maupun metode penelitian lainnya. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki relevansi dengan topik penelitian.
2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka dan telah melalui proses pengolahan sebelumnya, sehingga berperan sebagai data pendukung dalam analisis penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi, sementara instrumen pengumpulan data adalah alat yang

dipilih dan diterapkan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih teratur dan efisien.⁵⁵ Ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk pergi ke lapangan dan mengamati berbagai aspek seperti lokasi, pelaku, aktivitas, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁵⁶ Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan informasi secara rinci dan melakukan interpretasi berdasarkan teori agar dapat menghasilkan penjelasan dan kesimpulan yang jelas. Dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang direncanakan antara pewawancara dan narasumber untuk memberikan atau mendapatkan informasi tertentu. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan keterangan dan pendapat secara lisan dari seorang konsumen, baik melalui kontak langsung maupun melalui media online.⁵⁷ Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Dalam percakapan ini, terdapat dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini memberi keleluasaan yang lebih besar dibandingkan wawancara

⁵⁵ Ridwan, Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta, (Bandung: Alfabeta, 2004),137

⁵⁶ Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publishingm, 2015), 104

⁵⁷ Ibid, 108

⁵⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 135.

terstruktur, karena pewawancara tidak terpaku sepenuhnya pada daftar pertanyaan yang kaku. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali permasalahan secara lebih mendalam dan terbuka, sehingga pihak yang diwawancarai dapat menyampaikan pendapat serta pandangannya secara bebas. Melalui metode ini, peneliti tetap menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada informan sebagai panduan dalam proses wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang bersumber dari bahan tertulis atau rekaman yang tersimpan dalam dokumen resmi. Dokumen tersebut berfungsi sebagai pendukung data penelitian, seperti arsip atau catatan-catatan formal yang berkaitan dengan topik yang diteliti.⁵⁹ Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa foto, tulisan, gambar, yang diperoleh dari tempat penelitian.

3.6 Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.

Tabel 3. 2 Daftar Informan penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie	1 Orang
2	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (DikDas)	1 Orang

⁵⁹ 12 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014),165.

3	Kepala Sekolah SDN Keude Batee	1 Orang
4	Guru Sekolah SDN Keude Batee	2 Orang
5	Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus	2 Orang
	Total	7 Orang

Sumber: Olahan Peneliti 2026

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif dikarenakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data.⁶⁰

Menurut Sugiyono, triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya, triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁶¹

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menelusuri dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta catatan lapangan. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, menyusunnya berdasarkan pola, menguraikannya ke dalam bagian-bagian yang lebih

⁶⁰ M. Husnullail, Risnita, M. Syahrani Jailani, dan Asbui, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah," Jurnal Genta Mulia 15, no. 2 (2024): 70–78

⁶¹ Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta

rinci, melakukan sintesis, menentukan informasi yang relevan dan layak untuk dikaji lebih lanjut, serta menarik kesimpulan sehingga hasilnya dapat dipahami dengan jelas, baik oleh peneliti maupun oleh orang lain.⁶²

1. Reduksi Data

Informasi yang diperoleh dari laporan biasanya sangat banyak, sehingga perlu dicatat secara cermat dan rinci. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum isi pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang dianggap penting, serta menelaah tema dan pola yang muncul dari data tersebut.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disusun dalam bentuk uraian mengenai keterkaitan antar kategori, ringkasan, grafik, maupun bentuk penyajian lainnya. Melalui penyajian tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami situasi yang terjadi serta menyusun langkah kerja berikutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh. Pada dasarnya, penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menata dan memaparkan seluruh data secara menyeluruh agar diperoleh gambaran yang jelas, lengkap, dan utuh.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila pada proses berikutnya ditemukan bukti-bukti pendukung yang baru. Namun, apabila peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan hasil temuan selanjutnya menguatkan kesimpulan sebelumnya dengan bukti yang sah serta konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan final dan dapat dipercaya.

⁶² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244

4. Triangulasi Data

Setelah proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan, peneliti melakukan triangulasi data untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan hasil penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti juga membandingkan informasi dari berbagai informan, yaitu pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, kepala sekolah, guru, dan orang tua anak berkebutuhan khusus. Apabila informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik menunjukkan kesesuaian, maka data tersebut digunakan sebagai dasar dalam memperkuat hasil penelitian. Dengan demikian, triangulasi membantu peneliti memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.⁶³

⁶³ Ibid,246.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kondisi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Negeri Keude Batee

Kabupaten Pidie

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Keude Batee Kabupaten Pidie, diketahui bahwa sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk mengikuti proses pembelajaran bersama dengan peserta didik reguler. Secara keseluruhan, SDN Keude Batee memiliki 200 peserta didik yang tersebar dari kelas I sampai dengan kelas VI, dengan 10 peserta didik berkebutuhan khusus. Keberadaan 10 peserta didik ABK tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan pendidikan inklusif di sekolah bukan hanya berkaitan dengan penerimaan peserta didik, tetapi juga menyangkut kemampuan sekolah dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak.

Tabel 4. 1 Kondisi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SDN Keude Batee Kabupaten Pidie

Uraian	Kondisi
Jumlah seluruh peserta didik	200 peserta didik
Jumlah peserta didik ABK	10 peserta didik
Jenjang kelas	Kelas I–VI
Karakteristik ABK yang ditemukan	Autisme dan Down syndrome
Bentuk layanan	Pembelajaran bersama peserta didik regular
Kebutuhan utama	Pendampingan individual, penyesuaian pembelajaran,

	alat/media pembelajaran, dan dukungan guru
Kendala utama	Keterbatasan GPK, fasilitas, alat peraga, dan kemampuan pendampingan khusus

Sumber: Hasil penelitian, 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, peserta didik berkebutuhan khusus yang terdapat di SDN Keude Batee memiliki karakteristik dan kebutuhan yang beragam. Di antara karakteristik yang ditemukan di lapangan adalah peserta didik dengan autisme dan Down syndrome. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. 1 Siswa berkebutuhan Khusus di SDN Keude Batee



Sumber: Oleh peneliti, 2026

Guru menjelaskan bahwa kedua kondisi tersebut membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam proses pembelajaran maupun pendampingan. Peserta didik dengan autisme, misalnya, membutuhkan pengawasan yang lebih intensif karena terkadang sulit untuk tetap berada di tempat duduk dan dapat mengganggu konsentrasi peserta didik lainnya. Sementara itu, peserta didik dengan Down syndrome menunjukkan karakteristik

yang berbeda sehingga bentuk pendampingan yang diberikan juga perlu disesuaikan. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa peserta didik ABK tidak dapat diberikan perlakuan yang sama secara keseluruhan. Setiap anak memiliki kemampuan, hambatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda.

Oleh karena itu, guru dituntut untuk melakukan penyesuaian dalam memberikan materi, instruksi, metode pembelajaran, maupun pendampingan. Kondisi tersebut terlihat dalam proses pembelajaran di kelas, di mana terdapat peserta didik ABK yang membutuhkan pendampingan secara langsung agar dapat mengikuti kegiatan belajar. Guru harus duduk di dekat peserta didik dan memberikan arahan secara personal, sementara pada waktu yang sama guru juga harus memberikan perhatian kepada peserta didik reguler lainnya.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa peserta didik ABK merupakan bagian dari peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan di SDN Keude Batee. Mereka mengikuti pembelajaran dalam kelas reguler bersama peserta didik lainnya. Namun, keberadaan mereka membutuhkan adanya penyesuaian layanan pendidikan, karena kemampuan dan karakteristik masing-masing anak berbeda.

Dari hasil pengamatan dan wawancara, kebutuhan pendidikan ABK di lapangan tidak hanya terbatas pada kesempatan untuk bersekolah, tetapi juga mencakup kebutuhan terhadap pendampingan, pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan anak, serta ketersediaan media dan fasilitas pendukung. Guru menyampaikan bahwa terdapat peserta didik yang harus mendapatkan pendampingan secara terus-menerus agar dapat mengikuti pembelajaran. Kondisi tersebut menjadi cukup sulit karena guru juga harus mengelola peserta didik reguler dalam kelas yang sama.

Selain kebutuhan pendampingan, peserta didik ABK juga membutuhkan sarana pembelajaran yang sesuai dengan kondisi mereka. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sekolah masih membutuhkan ruang khusus dan alat peraga yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran ABK. Namun, sampai penelitian dilakukan, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan fasilitas tersebut juga dirasakan oleh orang tua peserta didik ABK yang menilai bahwa fasilitas yang tersedia di sekolah umum masih terbatas dibandingkan dengan fasilitas yang terdapat di sekolah khusus.

Di sisi lain, kondisi peserta didik ABK menunjukkan adanya perkembangan positif setelah memperoleh pendidikan di SDN Keude Batee. Orang tua menyampaikan bahwa terdapat perubahan dalam kemandirian, kedisiplinan, kemauan mengikuti kegiatan sekolah, serta kemampuan anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Salah satu orang tua bahkan menyampaikan bahwa anaknya yang sebelumnya harus dipaksa untuk berangkat sekolah, setelah bersekolah di SDN Keude Batee sudah mampu pergi dan mengikuti kegiatan sekolah tanpa dipaksa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga dapat memberikan ruang bagi perkembangan sosial, kemandirian, dan kemampuan belajar peserta didik ABK.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi anak berkebutuhan khusus di SDN Keude Batee cukup beragam dan membutuhkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak. Dari 200 peserta didik, terdapat 10 peserta didik ABK yang mengikuti pembelajaran bersama peserta didik reguler. Karakteristik yang ditemukan antara lain autisme dan Down syndrome, dengan kebutuhan yang berbeda dalam hal pendampingan, pembelajaran, interaksi sosial, serta penggunaan media pembelajaran.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi ABK di SDN Keude Batee sudah dilakukan melalui penerimaan dan pemberian kesempatan belajar bersama peserta didik reguler, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh kebutuhan layanan yang ideal. Keterbatasan Guru Pembimbing Khusus, fasilitas, alat peraga, dan dukungan pembelajaran menjadi hal yang masih perlu diperhatikan agar pelayanan pendidikan inklusif dapat berjalan secara lebih optimal.

4.1.2 Gambaran Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar Negeri Keude Batee Kabupaten Pidie

1. Gambaran Sekolah Dasar Negeri Keude Batee Kabupaten Pidie

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Keude Batee, yang terletak di Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie. Sekolah ini memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Pidie, khususnya sebagai salah satu sekolah inti dan unggulan yang ditunjuk untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). SDN Keude Batee bertanggung jawab dalam mengupayakan pemenuhan hak pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, baik peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar yang sama tanpa diskriminasi.



Gambar 4. 2 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Keude Batee
Sumber: Dari Peneliti, 2026

SDN Keude Batee berlokasi di wilayah yang mudah dijangkau oleh masyarakat Kecamatan Batee dan sekitarnya, sehingga menjadi salah satu pilihan utama orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Saat ini, SDN Keude Batee menampung sebanyak 200 murid yang terbagi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dari total seluruh peserta didik tersebut, terdapat 10 anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mengikuti proses pembelajaran di sekolah ini. Pendekatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee memungkinkan penelitian ini untuk menilai secara langsung implementasi kebijakan pendidikan inklusif, baik dari sisi sekolah sebagai pelaksana kebijakan maupun dari sisi orang tua dan peserta didik ABK sebagai penerima manfaat.

Penelitian ini menyoroti pentingnya inisiatif penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Pidie serta regulasi daerah yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Pidie Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pidie. Selain itu, kebijakan ini juga didukung oleh legitimasi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara pendidikan dilarang menolak peserta didik

penyandang disabilitas. Visi dan Misi SDN Keude Batee disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang sejalan dengan komitmen pelayanan pendidikan untuk semua. Adapun Visi SDN Keude Batee adalah: “Terwujudnya Peserta Didik yang Berakhlak Mulia, Cerdas, Terampil, Inklusif, dan Berkelanjutan dalam Lingkungan Belajar yang Kondusif.” untuk mewujudkan visi tersebut, SDN Keude Batee memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan peserta didik melalui penanaman nilai-nilai syariat dan akhlakul karimah.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif untuk mengoptimalkan potensi akademis dan non-akademis peserta didik.
3. Mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak, non-diskriminatif, dan inklusif bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
4. Meningkatkan kompetensi serta profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
5. Membangun kerja sama yang harmonis antara pihak sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee menjadi salah satu hal penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak disabilitas/berkebutuhan khusus di Kabupaten Pidie. Program dan aktivitas sekolah diarahkan untuk memberikan ruang dan kesempatan belajar yang sama bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat berkembang secara optimal bersama teman sebayanya.

2. Gambaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang berkedudukan di Kota Sigli. Dinas ini dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, termasuk tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Pidie. Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas ini diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, yang menggantikan pengaturan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 62 Tahun 2020 mengenai hal yang sama.



Gambar 4. 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie
Sumber: Sinar Pidie.co 2024

Secara struktural, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Pidie melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat yang membawahi urusan ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, dan barang milik daerah, serta beberapa bidang teknis, yaitu Bidang Pembinaan Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas), Bidang Pembinaan Ketenagaan atau Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), serta Bidang Kebudayaan. Susunan ini menempatkan pembinaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di seluruh kecamatan, termasuk SDN Keude Batee, di bawah kewenangan langsung Bidang Dikdas.

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, yang mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengendalian, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, ketenagaan pendidikan, dan kebudayaan di wilayah Kabupaten Pidie. Selain fungsi teknis tersebut, dinas ini juga menjalankan fungsi administrasi umum yang meliputi pengelolaan ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana di lingkungan dinas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang tertib dan akuntabel.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie memegang peran sentral sebagai penanggung jawab kebijakan sekaligus pengawas pelaksanaan Peraturan Bupati Pidie Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pidie. Melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, dinas ini mengoordinasikan penunjukan sekolah inti atau sekolah rujukan inklusif, termasuk SDN Keude Batee, serta memantau ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK), sarana pendukung, dan proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di satuan pendidikan dasar. Posisi tersebut menjadikan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagai pemangku kepentingan kunci yang dilibatkan sebagai informan dalam penelitian ini, mengingat

keduanya memahami secara langsung kebijakan, hambatan, maupun capaian implementasi pendidikan inklusif di lapangan.

4.1.3 Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Negeri Keude Batee Kabupaten Pidie

Berdasarkan kerangka *Index for Inclusion* yang dikemukakan oleh Booth dan Ainscow, implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat dianalisis melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu budaya inklusif (*inclusive culture*), kebijakan inklusif (*inclusive policy*), dan praktik inklusif (*inclusive practice*).⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tujuh informan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas), Kepala Sekolah SDN Keude Batee, dua orang guru SDN Keude Batee, serta dua orang tua dari anak berkebutuhan khusus (ABK), diperoleh gambaran mengenai sejauh mana ketiga dimensi tersebut telah diimplementasikan di SDN Keude Batee Kabupaten Pidie. Uraian hasil temuan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Budaya Inklusif (Inclusive Culture)

Budaya inklusif di SDN Keude Batee tercermin dari hubungan yang harmonis antara guru, peserta didik, dan orang tua. Kepala Sekolah SDN Keude Batee menegaskan bahwa hubungan antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik lainnya berjalan aman dan saling menghargai.

⁶⁴ Sulistiyarningsih and Handayani, “Analisis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Index for Inclusion.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Keude Batee, beliau menjelaskan bahwa:

“Tidak ada masalah dalam pergaulan mereka. Anak-anak saling menghargai satu sama lain dan hubungan pertemanan di antara mereka juga berjalan dengan baik. Mereka tetap bermain bersama, berinteraksi, dan bergaul seperti biasa tanpa membedakan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak lainnya. Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, mereka juga tetap bisa berkomunikasi dan melakukan aktivitas bersama. Jika ada teman yang membutuhkan bantuan, anak-anak lainnya bersedia membantu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, sejauh ini hubungan antara anak berkebutuhan khusus dengan teman-temannya berjalan dengan baik dan tidak terlihat adanya perlakuan yang membedakan.”

Upaya menciptakan lingkungan kelas yang inklusif juga dilakukan guru dengan memberikan pemahaman kepada siswa reguler mengenai kondisi teman mereka yang berkebutuhan khusus. Guru mengingatkan siswa agar tidak mengganggu, mengejek, atau memperlakukan ABK secara berbeda, tetapi sebaliknya memberikan perhatian dan bantuan ketika diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru sekolah SDN Keude Batee, beliau menjelaskan bahwa:

“Ya memang anak yang lain kita kasih tahu juga, jangan kawan-kawan kasih ganggu dia. Kawan-kawannya kan sudah kita kasih pengertian dan sudah kita ceritakan dari awal tentang kondisi dia. Kita sampaikan bahwa dia itu membutuhkan perhatian lebih dan tidak sama seperti kalian, jadi harus lebih memahami dan membantu kalau dia mengalami kesulitan. Alhamdulillah, setelah kita berikan pemahaman seperti itu, anak-anak yang lain juga sudah mengerti dan tidak mengganggu, malah mereka bisa lebih memperhatikan dan membantu temannya.”

Penerimaan terhadap keberagaman ini turut dirasakan oleh orang tua ABK. Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus yang ke 2 menyatakan bahwa lingkungan sekolah, terutama pihak guru, sangat terbuka dan mendukung:

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua dari anak berkebutuhan khusus, beliau menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah sangat bagus, sekolah juga sangat menerima keberadaan anak kami. Antara kami sebagai wali murid dengan guru saling terbuka, saling berinteraksi, dan saling memahami. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan atau kebutuhan anak, kami bisa berkomunikasi dengan guru sehingga bersama-sama dapat mencari cara yang terbaik untuk mendukung anak selama mengikuti pembelajaran di sekolah.”

Sementara itu, Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus 1 mengungkapkan bahwa penerimaan di lingkungan sekolah pada dasarnya positif, meskipun masih dijumpai riak-riak kecil berupa candaan atau usilan antarsesama siswa yang dianggap wajar dan dapat dimaklumi:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus 1, beliau menjelaskan bahwa:

“Penerimaan lingkungan, kalau antar sesama anak-anak saya lihat sudah cukup baik. Memang terkadang masih ada perilaku dari beberapa siswa yang kurang memahami kondisi teman berkebutuhan khusus, tetapi hal tersebut masih dalam batas yang dapat kami maklumi dan terus kami arahkan agar mereka dapat saling menghargai. Kalau dari pihak guru, apresiasinya alhamdulillah sangat baik. Guru-guru juga memberikan perhatian dan berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua siswa.”

Dalam rangka menanamkan nilai-nilai inklusif, Kepala Sekolah SDN Keude Batee menuturkan bahwa sekolah membangun sikap saling menghargai sejak awal peserta didik masuk sekolah melalui sosialisasi kepada wali murid, serta memasang spanduk anti-perundungan (anti-bullying) yang berisi kesepakatan bersama seluruh siswa untuk saling menghormati:

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Keude Batee, beliau menjelaskan bahwa:

“Itu ada kami pasang spanduk anti-bullying di sekolah. Spanduk tersebut sebagai salah satu bentuk upaya kami untuk mengingatkan siswa agar tidak melakukan bullying kepada teman-temannya. Selain itu, ada juga suatu kesepakatan yang ditandatangani oleh siswa sebagai bentuk komitmen bersama

untuk saling menghargai satu sama lain, menghormati teman, dan menjaga hubungan yang baik antar siswa di lingkungan sekolah.”

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) yang menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan turut mendorong pembentukan sikap inklusif pada peserta didik, seperti saling menyapa, mengenal, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Namun demikian, nilai-nilai inklusif tersebut pada praktiknya lebih banyak berjalan secara lisan dan situasional, sebagaimana diakui oleh Kepala Sekolah bahwa saat ini sekolah tidak lagi memiliki aturan tertulis yang secara khusus mengatur keberagaman peserta didik, sehingga penanaman budaya inklusif sangat bergantung pada kebiasaan dan komitmen individu warga sekolah, bukan pada suatu sistem nilai yang terlembagakan secara formal.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lingkungan SDN Keude Batee, terlihat bahwa interaksi antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus berlangsung secara cukup baik.





Gambar 4. 4 ABK berbaaur dengan murid reguler
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026.

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus tidak terlihat dipisahkan dari peserta didik lainnya dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Pada saat waktu istirahat maupun ketika berada di lingkungan sekolah, peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus tampak berinteraksi, bermain, dan berkomunikasi bersama. Peserta didik reguler juga menunjukkan sikap menerima dan tidak menjadikan kondisi khusus yang dimiliki temannya sebagai alasan untuk membatasi pergaulan.

Hasil observasi tersebut menunjukkan adanya hubungan sosial yang positif antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Sikap saling menghargai terlihat dari kesediaan peserta didik untuk berinteraksi dan bermain bersama tanpa membedakan kondisi masing-masing. Meskipun dalam beberapa situasi masih dapat ditemukan perilaku bercanda atau usil antarsiswa, secara umum interaksi yang terjalin menunjukkan adanya penerimaan terhadap keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Temuan ini sejalan dengan pernyataan guru yang

memberikan pemahaman kepada peserta didik reguler agar tidak mengganggu teman yang berkebutuhan khusus dan memahami bahwa mereka membutuhkan perhatian yang lebih.

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh pernyataan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus yang menilai bahwa pihak sekolah, khususnya guru, menerima keberadaan anak mereka dengan baik dan membangun komunikasi yang terbuka dengan orang tua. Dengan demikian, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penerimaan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tidak hanya terlihat dari pernyataan pihak sekolah dan orang tua, tetapi juga tercermin dalam hubungan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

2. Kebijakan Inklusif (Inclusive Policy)

Pada dimensi kebijakan inklusif, hasil wawancara menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal di tingkat kabupaten dengan implementasi konkret di tingkat satuan pendidikan. Secara kelembagaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie menyatakan bahwa pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus telah memiliki payung hukum sejak tahun 2012 Nomor 44.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pidie, beliau menjelaskan bahwa:

“Sejak tahun 2012 dan ada SK-nya juga, kita di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pidie sudah mulai memberikan pelayanan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi, sejak adanya kebijakan tersebut, sekolah-sekolah sudah diarahkan untuk memberikan perhatian dan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka masing-masing.”

Kepala Bidang Dikdas turut menambahkan bahwa dasar regulasi pendidikan inklusif di Kabupaten Pidie merujuk pada Peraturan Bupati Pidie tentang pendidikan

inklusi Nomor 44 tahun 2012 serta Qanun Pendidikan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Kepala Bidang Dikdas menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan tidak memberikan pedoman kurikulum adaptif secara baku kepada sekolah, sehingga penyesuaian layanan sepenuhnya diserahkan kepada kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik di lapangan:

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dikdas, beliau mengatakan bahwa:

“Tidak ada panduan kurikulum khusus yang kami berikan kepada sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Biasanya kami melihat terlebih dahulu kemampuan dan kebutuhan dari masing-masing siswa, karena setiap anak memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda. Jadi, dalam pelaksanaannya kami lebih menyesuaikan layanan dan pembelajaran dengan kondisi siswa tersebut agar mereka tetap dapat mengikuti proses pendidikan sesuai dengan kemampuannya.”

Hal senada disampaikan Kepala Sekolah SDN Keude Batee yang menyatakan bahwa sekolah tetap menggunakan kurikulum umum karena tidak ada kurikulum khusus maupun kelas khusus bagi ABK, dan penyesuaian pembelajaran sepenuhnya bergantung pada inisiatif guru kelas. Dari sisi dukungan sarana, anggaran, dan tenaga ahli, ditemukan pula ketimpangan antara klaim Dinas Pendidikan dan kondisi riil di sekolah. Kepala Bidang Dikdas menyebutkan bahwa Dinas pernah membangun fasilitas pendukung berupa tangga ramah disabilitas dan toilet khusus, meskipun diakui belum sepenuhnya lengkap. Namun, Kepala Sekolah SDN Keude Batee menyampaikan bahwa hingga saat ini sekolah belum menerima bentuk penghargaan maupun bantuan konkret dari Dinas Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sdn keude batee, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk masalah penghargaan, selama ini kami tidak mendapatkan penghargaan khusus dari pihak dinas terkait dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Selain itu, kami juga belum mendapatkan bantuan secara khusus, baik

berupa fasilitas, alat pembelajaran maupun bentuk dukungan lainnya dari dinas. Jadi, untuk menjalankan dan memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus, kami masih berusaha menyesuaikan dengan kondisi dan fasilitas yang tersedia di sekolah.”

Ketiadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) juga menjadi persoalan kebijakan yang menonjol. Kepala Sekolah menegaskan bahwa SDN Keude Batee tidak memiliki guru maupun kelas khusus bagi ABK, sehingga tanggung jawab pendampingan sepenuhnya berada pada guru kelas reguler yang pernah mendapatkan pembekalan singkat. Temuan ini memperkuat identifikasi masalah pada Bab I terkait tidak adanya jumlah GPK di Kabupaten Pidie serta belum optimalnya penerjemahan Peraturan Bupati Pidie Nomor 44 Tahun 2012 ke dalam kebijakan operasional di tingkat sekolah. Dengan kata lain, kebijakan inklusif di SDN Keude Batee saat ini lebih banyak berjalan atas dasar kebiasaan (praktik yang diwariskan) dan kesediaan sekolah untuk menerima ABK, dibandingkan atas dasar kebijakan tertulis, kurikulum adaptif baku, maupun dukungan sumber daya yang terstruktur.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee tidak hanya berkaitan dengan penerimaan anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagai peserta didik, tetapi juga mencakup pembagian tanggung jawab antara pihak sekolah, guru, orang tua, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie. Berdasarkan hasil penelitian, SDN Keude Batee menerima peserta didik ABK dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti pembelajaran bersama peserta didik reguler. Namun, sekolah belum memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) sehingga pendampingan peserta didik ABK dalam kegiatan pembelajaran masih menjadi tanggung jawab guru kelas.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru kelas memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing peserta

didik ABK. Guru melakukan penyesuaian materi, tugas, metode, serta memberikan pendampingan secara individual ketika anak mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran. Salah satu guru menjelaskan bahwa terdapat peserta didik yang membutuhkan pendampingan secara langsung dan harus ditemani agar mau mengikuti pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa guru kelas menjadi pelaksana utama layanan pendidikan ABK di tingkat kelas.

Pembagian tanggung jawab tersebut menjadi lebih kompleks karena guru tidak hanya menangani peserta didik ABK, tetapi juga bertanggung jawab terhadap seluruh peserta didik reguler dalam kelas. Salah satu guru menjelaskan bahwa peserta didik ABK terkadang membutuhkan perhatian hampir terus-menerus, sementara guru tetap harus mengajar dan memperhatikan peserta didik lainnya. Oleh karena itu, keterbatasan GPK menyebabkan tanggung jawab pendampingan yang seharusnya dapat diberikan oleh tenaga khusus pada praktiknya masih banyak ditangani oleh guru kelas.

Dalam menghadapi peserta didik yang menunjukkan perilaku atau kondisi yang membutuhkan perhatian lebih, guru melakukan pendampingan secara langsung dan menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik anak. Guru menjelaskan bahwa peserta didik dengan autisme dan Down syndrome memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak dapat ditangani dengan cara yang sama. Peserta didik dengan autisme, misalnya, membutuhkan pengawasan lebih intensif karena terkadang meninggalkan tempat duduk dan mengganggu teman, sedangkan peserta didik dengan Down syndrome memiliki pola perilaku yang berbeda.

Dengan demikian, penanganan terhadap kondisi peserta didik ABK di sekolah masih bersifat langsung, individual, dan situasional. Guru menyesuaikan bentuk

pendampingan berdasarkan kondisi anak pada saat kegiatan berlangsung. Namun, dari hasil penelitian belum ditemukan adanya prosedur tertulis khusus atau standar operasional yang menjelaskan secara rinci tahapan penanganan ketika peserta didik ABK mengalami tantrum atau kondisi perilaku tertentu. Oleh sebab itu, pelaksanaan pendampingan dalam kondisi tersebut masih bergantung pada kemampuan dan pengalaman guru yang berada di kelas.

Permasalahan hubungan sosial antara peserta didik ABK dan peserta didik reguler juga menjadi bagian yang diperhatikan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, orang tua menyampaikan bahwa hubungan antarsiswa pada umumnya berjalan baik, meskipun masih terdapat candaan atau usilan antarsiswa.

Untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengganggu peserta didik ABK, sekolah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya saling menghargai. Kepala sekolah menjelaskan bahwa sekolah memasang spanduk anti-bullying yang disertai kesepakatan peserta didik untuk saling menghargai satu sama lain. Guru juga memberikan pemahaman kepada peserta didik reguler agar tidak mengganggu teman yang berkebutuhan khusus dan memahami bahwa mereka membutuhkan perhatian lebih.

Berdasarkan temuan tersebut, guru menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan permasalahan interaksi antarsiswa di lingkungan kelas, sedangkan kepala sekolah berperan dalam memberikan arahan dan membangun kebijakan sekolah yang berkaitan dengan lingkungan yang aman dan bebas dari perundungan. Namun, penelitian ini belum menemukan keterangan mengenai adanya prosedur tertulis yang secara khusus mengatur siapa yang mengambil keputusan dan bagaimana tahapan penanganan apabila terjadi bullying terhadap peserta didik ABK. Dengan demikian, mekanisme penanganan

yang tersedia lebih terlihat dalam bentuk pencegahan, pengawasan, dan pengarahan oleh guru serta pihak sekolah.

Keterlibatan Orang Tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus belum menemukan keterangan mengenai adanya prosedur tertulis yang secara khusus mengatur siapa yang mengambil keputusan dan bagaimana tahapan penanganan apabila terjadi bullying terhadap peserta didik ABK. Dengan demikian, mekanisme penanganan yang tersedia lebih terlihat dalam bentuk pencegahan, pengawasan, dan pengarahan oleh guru serta pihak sekolah. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, orang tua juga terlibat dalam mendukung perkembangan peserta didik ABK. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antara orang tua dengan guru berlangsung secara terbuka. Salah satu orang tua menyampaikan bahwa hubungan antara wali murid dan guru berjalan baik, saling berinteraksi, dan saling memahami.

Keterlibatan orang tua tidak hanya dalam komunikasi dengan pihak sekolah, tetapi juga dalam mendukung proses belajar anak di luar sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua berkomunikasi dengan guru untuk memantau perkembangan anak dan turut memberikan bimbingan belajar di rumah. Kerja sama tersebut memberikan dukungan terhadap perkembangan peserta didik ABK, baik dalam hal kemandirian maupun kemampuan mengikuti kegiatan sekolah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa orang tua telah menjadi bagian dari dukungan pendidikan ABK, meskipun berdasarkan data penelitian belum ditemukan adanya bentuk perumusan kebijakan sekolah secara formal yang secara khusus melibatkan orang tua sebagai anggota dalam penyusunan standar atau aturan layanan

ABK. Keterlibatan orang tua yang ditemukan lebih banyak berupa komunikasi, pemantauan perkembangan anak, dan pendampingan belajar di rumah.

Pada tingkat pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar memiliki posisi dalam mengoordinasikan sekolah dan memantau pelaksanaan layanan pendidikan inklusif.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan dari Dinas Pendidikan kepada SDN Keude Batee belum sepenuhnya dirasakan di tingkat sekolah. Kepala sekolah menyatakan bahwa sekolah belum memperoleh bantuan konkret dari Dinas Pendidikan dalam bentuk penghargaan maupun dukungan yang secara langsung ditujukan untuk penyelenggaraan layanan ABK.

Di sisi lain, pihak Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa pernah terdapat pembangunan fasilitas pendukung berupa tangga yang ramah disabilitas dan toilet khusus, meskipun fasilitas tersebut diakui belum sepenuhnya lengkap. Pada aspek kurikulum, Dinas juga menyatakan bahwa belum terdapat panduan kurikulum khusus yang diberikan kepada sekolah, sehingga penyesuaian layanan diserahkan kepada kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Dinas Pendidikan dan sekolah telah ada dalam bentuk pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif, tetapi dukungan operasional yang diterima sekolah masih belum optimal, seperti ketiadaan guru pembimbing khusus, dan infrastruktur belum memadai. Dengan kata lain,

terdapat perbedaan antara keberadaan kebijakan pada tingkat pemerintah daerah dengan ketersediaan dukungan konkret di tingkat satuan Pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti, pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee terlihat melalui keberadaan peserta didik ABK yang mengikuti kegiatan pembelajaran bersama peserta didik reguler. Guru memberikan perhatian tambahan kepada peserta didik ABK selama proses pembelajaran dan melakukan penyesuaian ketika anak mengalami kesulitan mengikuti kegiatan belajar. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil wawancara bahwa guru memberikan pendampingan secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa interaksi sosial antara peserta didik ABK dan peserta didik reguler berlangsung dalam lingkungan sekolah yang sama. Upaya sekolah dalam membangun hubungan yang saling menghargai terlihat dari pemberian arahan kepada peserta didik dan adanya media kampanye anti-bullying di lingkungan sekolah. Temuan observasi tersebut mendukung hasil wawancara kepala sekolah dan guru mengenai upaya menciptakan lingkungan yang aman dan menerima peserta didik ABK.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee masih berpusat pada pihak sekolah dan guru kelas. Kepala sekolah berperan dalam mengarahkan dan menjaga lingkungan sekolah yang inklusif, guru kelas menjalankan pendampingan dan pembelajaran sehari-hari, orang tua mendukung perkembangan anak melalui komunikasi dan pendampingan di rumah, sedangkan Dinas Pendidikan berperan pada tingkat kebijakan dan pembinaan. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh GPK, pedoman pembelajaran adaptif, prosedur tertulis

penanganan permasalahan ABK, serta dukungan eksternal yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee telah berjalan dalam bentuk praktik nyata, tetapi masih membutuhkan penguatan kelembagaan agar tanggung jawab dan mekanisme pelayanan ABK menjadi lebih jelas dan berkelanjutan

3. Praktik Inklusif (Inclusive Practice)

Pada dimensi praktik inklusif, pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Keude Batee dilaksanakan melalui penyesuaian materi dan metode secara individual oleh masing-masing guru kelas. Guru Sekolah SDN Keude Batee 1 menjelaskan bahwa materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan aktual peserta didik ABK, misalnya dengan menyederhanakan materi berhitung dan menggunakan alat peraga konkret seperti stik es krim warna warni agar lebih mudah dipahami. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 1 sekolah sdn keude batee, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau anak yang lain, misalnya pada pelajaran berhitung, mereka sudah bisa mengerjakan penjumlahan atau soal-soal yang diberikan sesuai dengan materi pembelajaran. Tetapi kalau untuk anak inklusif, tugasnya kita sesuaikan lagi dengan kemampuan mereka. Misalnya, kalau anak yang lain mengerjakan penjumlahan, untuk dia kita bisa mulai dari mengenalkan angka terlebih dahulu atau memberikan tugas yang lebih sederhana. Anak inklusif masih membutuhkan sesuatu yang jelas dan nyata, jadi pembelajarannya lebih mudah kalau menggunakan benda atau contoh yang bisa dilihat dan dipahami secara langsung.”

Pendekatan serupa turut disampaikan oleh Guru SDN Batee 2 yang menekankan pentingnya pendekatan personal dalam membimbing peserta didik ABK, karena metode pembelajaran klasikal dinilai kurang efektif untuk mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru sekolah sdn keude batee 2, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk anak yang agak khusus itu memang harus ada pendekatan tersendiri. Kita sebagai guru harus lebih memperhatikan dan menyesuaikan cara mengajarnya dengan kondisi anak tersebut, karena tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan anak-anak yang lain. Kalau untuk anak yang biasa, kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang sudah ada, misalnya dengan

menjelaskan melalui ceramah, kemudian memberikan tugas dan latihan. Tetapi untuk anak berkebutuhan khusus, biasanya kita perlu memberikan perhatian lebih dan menggunakan cara yang lebih sederhana agar mereka bisa mengikuti dan memahami pembelajaran.”

Praktik pengelolaan pembelajaran (*orchestrating learning*) tersebut, meskipun menunjukkan adanya upaya adaptasi, pada dasarnya masih bersifat improvisatif dan sangat bergantung pada kreativitas masing-masing guru, bukan hasil dari suatu pedoman baku sebagaimana telah diuraikan pada dimensi kebijakan inklusif sebelumnya. Kondisi ini turut mempengaruhi aspek mobilisasi sumber daya (*mobilising resources*) dalam praktik inklusif, terutama terkait ketersediaan alat peraga dan tidak terdapatnya pelatihan guru. Guru Sekolah SDN Keude Batee 1 mengungkapkan keterbatasan alat peraga sebagai salah satu kendala utama dalam menjaga motivasi belajar ABK. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 1 sekolah sdn keude batee, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk sekolah ini, kami sangat berharap alat peraga dan media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus bisa lebih banyak lagi. Karena kalau alat peraganya kurang, kami sebagai guru juga mengalami kesulitan dalam mengajari dan memberikan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus. Anak-anak ini tidak bisa hanya disuruh menulis terus-menerus seperti anak yang lain, karena mereka bisa cepat merasa bosan. Jadi, mereka lebih membutuhkan alat peraga atau media pembelajaran yang menarik dan bervariasi agar mereka lebih mudah memahami materi dan tetap tertarik mengikuti proses pembelajaran.”

Terkait pembinaan tenaga pendidik, Guru SDN Batee 2 menyampaikan bahwa dirinya belum pernah menerima pelatihan khusus untuk menangani ABK, dan hanya mengandalkan layanan bimbingan konseling umum yang tersedia di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 2 sdn keude batee, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau dari guru khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus memang belum ada. Pada saat itu yang tersedia hanya Ibu Amel yang bertugas dalam bidang Bimbingan Konseling (BK). Jadi, untuk layanan pendampingan dan bimbingan kepada siswa, sekolah masih mengandalkan guru yang ada, terutama guru BK. Sekurang-kurangnya memang harus tersedia satu orang guru BK di sekolah untuk membantu memberikan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus.”

Meskipun demikian, mobilisasi dukungan dari luar sekolah, khususnya dari orang tua, mereka cukup berperan dalam menopang praktik pembelajaran inklusif. Guru Sekolah SDN Keude Batee 1 menjelaskan bahwa orang tua ABK secara rutin berkomunikasi dengan guru untuk memantau perkembangan anak dan turut membimbing anaknya belajar di rumah. Kolaborasi guru dan orang tua ini pada gilirannya berdampak positif terhadap partisipasi dan pencapaian belajar peserta didik ABK. Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus 2 menuturkan adanya peningkatan yang cukup berarti pada anaknya sejak bersekolah di SDN Keude Batee. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua anak berkebutuhan khusus 2, beliau mengatakan bahwa:

“Dulu sebelum sekolah di sini, anak saya harus dipaksa untuk pergi ke sekolah Tapi alhamdulillah selama di sini, pergi dari rumah tidak perlu dipaksa lagi. Sampai di sekolah dia sudah tahu peraturan; begitu sampai di halaman langsung masuk kelas dan belajar seperti anak-anak pada umumnya.”

Perkembangan positif serupa juga dirasakan oleh Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus 1, meskipun ia menekankan bahwa peningkatan tersebut berjalan bertahap sesuai dengan keterbatasan kondisi anaknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua 1 anak berkebutuhan khusus, beliau menjelaskan bahwa:

“Perubahan ada, meskipun memang perkembangannya agak lambat. Ibaratnya dari segi tulis-menulis, dia masih membutuhkan waktu dan latihan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Tetapi dari segi daya ingat, dia justru lebih unggul dan lebih mudah mengingat apa yang sudah dipelajari. Jadi, kemampuan mengingatnya lebih baik dibandingkan ketika harus melakukan atau mempraktikkan sesuatu secara langsung. Tapi begitulah perkembangannya, setiap anak memang memiliki kemampuan dan proses perkembangan yang berbeda-beda.”

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa dimensi praktik inklusif di SDN Keude Batee, meskipun berhasil menghasilkan capaian positif bagi peserta didik ABK dari sisi kenyamanan, keterlibatan, dan perkembangan belajar, pada dasarnya masih

dijalankan secara individual oleh guru tanpa didukung oleh pedoman pembelajaran adaptif yang baku, ketersediaan alat peraga yang memadai, maupun pelatihan guru yang berkelanjutan dan merata.

3. Tantangan- Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan tujuh informan serta hasil pengamatan di SDN Keude Batee Kabupaten Pidie, pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari kondisi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan guru, ketersediaan tenaga pendamping, sarana pembelajaran, serta dukungan yang diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Adapun hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak Terdapat Guru Pembimbing Khusus dan tenaga pendamping

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee adalah belum tersedianya Guru Pembimbing Khusus (GPK). Pendampingan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus masih dilakukan oleh guru kelas yang juga memiliki tanggung jawab untuk mengajar peserta didik reguler. Kondisi ini menjadi cukup sulit karena terdapat peserta didik ABK yang membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih lama, sedangkan guru tetap harus mengelola seluruh peserta didik dalam kelas. Salah satu guru menjelaskan bahwa ada anak yang harus terus ditemani agar tetap mengikuti pembelajaran, tetapi guru tidak mungkin hanya berfokus pada satu anak karena masih harus memperhatikan peserta didik lainnya.

Keterbatasan tenaga pendamping tersebut juga membuat guru harus menangani kebutuhan peserta didik berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Keadaan ini

menunjukkan bahwa keberadaan GPK masih sangat dibutuhkan untuk membantu guru dalam memberikan pelayanan yang lebih sesuai kepada peserta didik ABK.

2. Kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam menangani ABK

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kemampuan guru dalam memahami dan menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Pendidikan, masih terdapat guru yang belum memahami pendidikan inklusif secara menyeluruh. Selain itu, kesempatan memperoleh pelatihan khusus bagi guru juga masih terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, beliau menjelaskan bahwa:

“Kurangnya pemahaman, terutama pemahaman konsep pendidikan inklusi dari kalangan guru itu sendiri, keterbatasan tenaga ahli, kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK), fasilitas yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, belum ada adaptasi kurikulum dan pembelajaran yang baku, keterbatasan anggaran untuk layanan inklusif yang maksimal, dan masih ada hambatan stigma terhadap anak berkebutuhan khusus.”

Kondisi tersebut terlihat dalam proses pembelajaran karena guru harus menyesuaikan sendiri cara menangani peserta didik berdasarkan pengalaman dan kondisi anak. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda sehingga guru tidak dapat menggunakan cara yang sama untuk seluruh ABK. Guru menjelaskan bahwa peserta didik dengan autisme membutuhkan pengawasan yang berbeda dengan peserta didik yang mengalami Down syndrome. Ada anak yang mudah meninggalkan tempat duduk atau mengganggu teman sehingga membutuhkan perhatian lebih, sementara anak lainnya memiliki kondisi yang berbeda.

3. Keterbatasan sarana, prasarana, dan alat peraga

Ketersediaan sarana pendukung juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian, SDN Keude Batee masih

membutuhkan ruang dan alat peraga yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran peserta didik ABK. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sekolah masih mengharapkan bantuan berupa ruang khusus dan alat peraga, tetapi kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Keude Batee, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau sama pemerintah kami memang mengharapkan bantuan untuk yang berkebutuhan khusus, minimal ada ruangan khusus satu, kemudian ada alat peraga yang bisa digunakan pada saat proses pembelajaran. Sampai saat ini kami memang berharap ada. Kalau memang ada nanti kami terima, alhamdulillah. Tapi untuk saat ini belum.

Keterbatasan fasilitas tersebut juga dirasakan oleh orang tua peserta didik ABK. Salah satu orang tua membandingkan kondisi fasilitas di SDN Keude Batee dengan sekolah khusus yang pernah ditempati anaknya dan menilai bahwa fasilitas yang tersedia di sekolah saat ini masih terbatas. Kondisi tersebut membuat guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan fasilitas yang tersedia, meskipun kebutuhan peserta didik ABK cukup beragam.

4. Belum tersedianya pedoman pembelajaran yang khusus dan baku

Hambatan lain yang ditemukan adalah belum adanya pedoman pembelajaran adaptif yang secara khusus digunakan sebagai acuan sekolah. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan belum memberikan panduan kurikulum khusus kepada sekolah. Penyesuaian pembelajaran diserahkan kepada kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, beliau menjelaskan bahwa:

“Kurangnya pemahaman, terutama pemahaman konsep pendidikan inklusi dari kalangan guru itu sendiri, keterbatasan tenaga ahli, kurangnya Guru Pendamping

Khusus (GPK), fasilitas yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, belum ada adaptasi kurikulum dan pembelajaran yang baku, keterbatasan anggaran untuk layanan inklusif yang maksimal, dan masih ada hambatan stigma terhadap anak berkebutuhan khusus”.

Kondisi tersebut menyebabkan guru harus menentukan sendiri materi, tugas, dan cara pembelajaran yang dianggap sesuai dengan kondisi peserta didik. Upaya tersebut memang dapat membantu guru menyesuaikan pembelajaran, tetapi belum adanya pedoman yang jelas membuat pelaksanaannya belum memiliki acuan yang sama. Dengan demikian, kualitas layanan sangat bergantung pada kemampuan masing-masing guru dalam memahami dan menangani peserta didik ABK.

5. Perbedaan karakteristik dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus

Perbedaan kondisi setiap peserta didik ABK juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian, peserta didik yang ditangani oleh guru memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan cara pendampingan yang berbeda pula. Guru menyampaikan bahwa anak dengan autisme dapat menunjukkan perilaku yang berbeda dengan anak yang mengalami Down syndrome.

Perbedaan tersebut membuat guru perlu memberikan perhatian secara individual. Pada beberapa kondisi, peserta didik harus didampingi secara langsung agar mau mengikuti pembelajaran. Guru SDN Keude Batee 2 juga menyampaikan bahwa terdapat anak yang sulit diajak belajar dan membutuhkan guru untuk duduk di sampingnya agar mau mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan peserta didik ABK tidak dapat disamakan sehingga guru membutuhkan waktu, perhatian, dan cara pendampingan yang berbeda.

6. Keterbatasan dukungan kebijakan dan anggaran

Hambatan lainnya adalah dukungan kebijakan dan sumber daya yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sekolah. Pihak Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa masih terdapat keterbatasan tenaga ahli, GPK, fasilitas, kurikulum adaptif, dan anggaran untuk memberikan layanan pendidikan inklusif secara maksimal.

Pada tingkat sekolah, kepala sekolah juga menyampaikan bahwa bantuan khusus untuk mendukung layanan ABK belum sepenuhnya diterima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kebijakan pendidikan inklusif belum secara otomatis diikuti dengan dukungan sumber daya yang cukup di tingkat sekolah. Akibatnya, sekolah dan guru masih harus berusaha menyesuaikan layanan dengan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa hambatan pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee tidak hanya berasal dari satu aspek. Keterbatasan GPK, kemampuan guru, sarana dan alat peraga, pedoman pembelajaran, perbedaan karakteristik peserta didik, serta dukungan kebijakan dan anggaran saling berkaitan dalam memengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif. Meskipun guru dan pihak sekolah telah berusaha memberikan layanan sesuai dengan kondisi peserta didik, keterbatasan tersebut menyebabkan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee belum dapat berjalan secara optimal.

4.2 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SDN Keude Batee Kabupaten Pidie, pelaksanaan pendidikan inklusif menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus (ABK)

untuk memperoleh pendidikan bersama peserta didik reguler. Hal tersebut terlihat dari penerimaan sekolah terhadap keberadaan ABK, penempatan mereka dalam lingkungan kelas reguler, adanya penyesuaian pembelajaran, serta adanya upaya guru dan pihak sekolah dalam menciptakan hubungan yang baik antarpeserta didik.

Namun, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif belum sepenuhnya didukung oleh aturan sekolah, tenaga pendamping, sarana, dan pedoman pembelajaran yang memadai. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee sudah berjalan dalam kegiatan sehari-hari, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan pelayanan kepada peserta didik ABK belum dapat dilakukan secara maksimal.

SDN Keude Batee juga belum memiliki aturan tertulis yang secara khusus mengatur penerimaan dan penanganan anak berkebutuhan khusus (ABK). Selama ini sekolah lebih banyak menyesuaikan penanganan berdasarkan kondisi anak ketika berada di kelas. Guru memberikan pendampingan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak pada saat pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah masih banyak bergantung pada pengalaman dan kemampuan guru dalam menghadapi kondisi yang muncul di lapangan.

Dalam hal keterlibatan orang tua, hubungan antara guru dan orang tua sudah berjalan cukup baik melalui komunikasi mengenai perkembangan anak dan kegiatan belajar di rumah. Namun, orang tua belum dilibatkan secara langsung dalam penyusunan aturan atau kebijakan sekolah yang berkaitan dengan penanganan ABK. Hal ini terlihat ketika menghadapi masalah seperti ejekan atau *bullying* dan perilaku ABK yang dapat mengganggu proses belajar. Sekolah sudah melakukan pencegahan melalui arahan

kepada siswa dan pemasangan spanduk anti-*bullying*, tetapi belum terdapat aturan tertulis yang menjelaskan secara jelas langkah yang harus dilakukan apabila masalah tersebut terjadi.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dengan autisme dan Down Syndrome ditempatkan bersama peserta didik reguler di dalam kelas. Sementara itu, SDN Keude Batee belum memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK), sehingga penanganan ABK masih menjadi tanggung jawab guru kelas. Guru harus memberikan perhatian kepada ABK sekaligus melaksanakan pembelajaran bagi seluruh siswa di kelas. Kondisi ini menjadi cukup berat karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda dan beberapa anak membutuhkan pendampingan lebih banyak selama proses pembelajaran.

Penempatan ABK di sekolah reguler pada dasarnya dapat dilakukan selama sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak. Anak dengan hambatan fisik atau komunikasi yang tidak mengalami hambatan intelektual dapat mengikuti pembelajaran di sekolah reguler apabila didukung oleh guru dan fasilitas yang sesuai. Namun, bagi anak yang membutuhkan pendampingan lebih intensif, seperti sebagian anak dengan Down Syndrome atau autisme, diperlukan penilaian terhadap kondisi dan kebutuhan anak sebelum menentukan bentuk layanan pendidikan yang tepat. Jika kebutuhan tersebut belum mampu dipenuhi oleh sekolah reguler, maka pendidikan khusus dapat menjadi salah satu pilihan yang perlu dipertimbangkan.

Pada aspek budaya inklusif, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus telah diterima dengan cukup baik oleh lingkungan sekolah. Peserta didik ABK mengikuti kegiatan sekolah bersama peserta didik reguler dan tidak dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi, peserta

didik ABK terlihat berinteraksi dengan teman-temannya dalam lingkungan sekolah dan dapat mengikuti aktivitas bersama. Guru juga memberikan arahan kepada peserta didik reguler agar memahami kondisi teman yang berkebutuhan khusus, tidak mengganggu, dan tetap memperlakukan mereka sebagai bagian dari lingkungan kelas.

Kemudian Kepala sekolah menyampaikan bahwa antar peserta didik terdapat hubungan saling menghargai dan saling membantu, sedangkan orang tua juga menilai bahwa guru menerima keberadaan anak mereka dengan baik dan terbuka dalam berkomunikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan terhadap ABK sudah menjadi bagian dari kehidupan sekolah. Namun, budaya inklusif tersebut masih lebih banyak dibangun melalui kebiasaan, arahan guru, dan hubungan sehari-hari.

Sekolah memang telah melakukan upaya seperti memasang spanduk anti-bullying dan memberikan pemahaman kepada peserta didik, tetapi belum terdapat aturan tertulis yang secara khusus mengatur pembentukan budaya inklusif. Oleh karena itu, menurut peneliti, kondisi yang sudah baik ini masih perlu diperkuat agar sikap saling menghargai tidak hanya muncul karena adanya arahan dari guru, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah.

Pada aspek kebijakan inklusif, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendidikan inklusif di SDN Keude Batee telah memiliki dasar kebijakan dari pemerintah daerah, tetapi pelaksanaannya di tingkat sekolah masih memiliki keterbatasan. Sekolah telah menerima peserta didik ABK dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar bersama peserta didik reguler. Akan tetapi, kepala sekolah menjelaskan bahwa saat ini tidak terdapat lagi aturan tertulis khusus di sekolah yang mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie juga belum memberikan pedoman kurikulum khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan pembelajaran kepada ABK. Penyesuaian pembelajaran akhirnya dilakukan oleh guru berdasarkan kemampuan dan kondisi masing-masing anak. Keterbatasan lainnya adalah belum tersedianya Guru Pembimbing Khusus (GPK). Pendampingan masih dilakukan oleh guru kelas yang pada saat bersamaan juga harus mengajar peserta didik reguler.

Kondisi ini menyebabkan guru harus membagi perhatian antara kebutuhan ABK dan kebutuhan peserta didik lainnya. Menurut peneliti, keadaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif yang telah ditetapkan pemerintah belum seluruhnya diterjemahkan menjadi dukungan yang dapat dirasakan sekolah secara langsung. Sekolah memang telah menjalankan pendidikan inklusif, tetapi belum memiliki perangkat pendukung yang lengkap untuk mengatur dan menjalankan layanan ABK secara lebih terarah. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan masih banyak bergantung pada kesediaan sekolah dan kemampuan guru dalam menyesuaikan pelayanan dengan kondisi anak. Pada aspek praktik inklusif, guru telah melakukan berbagai usaha agar peserta didik ABK dapat mengikuti pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, materi dan tugas diberikan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Guru menyederhanakan materi, menggunakan contoh yang lebih konkret, dan memberikan penjelasan secara langsung apabila anak mengalami kesulitan.

Guru juga menggunakan pendekatan yang berbeda antara satu anak dengan anak lainnya karena kondisi peserta didik ABK tidak sama. Terdapat peserta didik yang membutuhkan pendampingan lebih dekat dan harus ditemani agar mau mengikuti

pembelajaran. Upaya tersebut menunjukkan bahwa guru tidak memberikan pembelajaran secara sama rata kepada semua peserta didik, tetapi berusaha menyesuaikannya dengan kondisi anak.

Dari sisi hasil, orang tua menyampaikan bahwa terdapat perkembangan pada anak setelah mengikuti pendidikan di SDN Keude Batee, seperti meningkatnya kemandirian, kemauan mengikuti kegiatan sekolah, dan perkembangan dalam belajar. Akan tetapi, proses tersebut masih menghadapi hambatan karena guru tidak didukung oleh GPK dan fasilitas khusus yang memadai. Sekolah masih membutuhkan alat peraga dan ruang yang dapat menunjang pembelajaran ABK. Kepala sekolah menyampaikan bahwa kebutuhan tersebut belum sepenuhnya tersedia.

Menurut peneliti, kondisi ini menunjukkan bahwa guru sebenarnya sudah berusaha memberikan layanan yang sesuai, tetapi kemampuan tersebut masih dibatasi oleh kurangnya dukungan. Guru harus menggunakan pengalaman dan inisiatif sendiri dalam menentukan cara mengajar dan mendampingi peserta didik ABK, sehingga pelaksanaan pembelajaran belum memiliki pola yang sama dan belum didukung oleh sistem yang kuat.

Jika dilihat secara keseluruhan, ketiga aspek tersebut saling berhubungan. Penerimaan yang baik terhadap peserta didik ABK menjadi dasar yang positif bagi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Akan tetapi, penerimaan tersebut perlu didukung dengan kebijakan yang jelas dan sumber daya yang cukup. Ketika sekolah belum memiliki GPK, pedoman pembelajaran khusus, dan fasilitas yang memadai, maka guru harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan peserta didik ABK.

Demikian pula, ketika aturan sekolah belum secara khusus mengatur layanan ABK, maka pelaksanaan pendidikan inklusif lebih banyak bergantung pada kebiasaan dan keputusan pihak sekolah dalam menghadapi kondisi yang muncul di lapangan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, terlihat bahwa sekolah telah melakukan upaya nyata dalam menerima dan melayani peserta didik ABK, tetapi dukungan yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan yang harus diberikan. Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Rika Melati Ana menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif masih mengalami perbedaan antara kebijakan dengan kondisi di lapangan.⁶⁵ Penelitian Teni Susanti dan Nenden Ineu Herawati juga menunjukkan bahwa guru, fasilitas, dan dukungan dana masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.⁶⁶

Sementara itu, penelitian Salsabila Feby Sakinah dan Hendry Andry menemukan bahwa keterbatasan kemampuan guru dan sarana menjadi salah satu penyebab pendidikan inklusif belum berjalan maksimal.⁶⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan persoalan yang hampir sama, terutama dalam hal tenaga pendamping, fasilitas, dan pembelajaran yang masih bergantung pada kemampuan guru. Perbedaannya, penelitian ini melihat secara langsung kondisi yang terjadi di SDN Keude Batee Kabupaten Pidie, sehingga dapat menunjukkan bagaimana kendala tersebut dirasakan dalam proses pembelajaran dan pelayanan sehari-hari.

⁶⁵ Rika Melati Ana. 2023. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sd Plus Darul Fudlola Cibinong.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

⁶⁶ Teni Susanti, Nenden Ineu Herawati, "Implementasi Pendidikan Inklusif Disekolah Dasar Kabupaten Bandung Barat.

⁶⁷ Salsabila Feby Sakinah, Hendry Andry, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tingkat Sekolah Dasar Penggerak Kota Pekanbaru."

Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee sudah terlihat dalam praktik sehari-hari, tetapi masih perlu diperkuat dari sisi kebijakan dan dukungan sekolah. Sekolah perlu memiliki aturan yang jelas mengenai penerimaan dan penanganan ABK, melibatkan orang tua ketika menghadapi permasalahan anak, serta mendapatkan dukungan GPK dan fasilitas yang sesuai. Hal tersebut diperlukan agar pelayanan kepada ABK dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kebutuhan peserta didik reguler lainnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Keude Batee Kabupaten Pidie, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee Kabupaten Pidie telah dilaksanakan, tetapi belum optimal. Sekolah telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan menempatkan mereka bersama peserta didik reguler dalam kelas yang sama. Guru juga telah menyesuaikan materi dan cara pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik serta memberikan pendampingan ketika diperlukan. Sekolah turut berupaya menciptakan lingkungan yang menerima ABK melalui pembinaan kepada siswa dan pencegahan perundungan. Namun, pelaksanaannya masih terkendala karena belum tersedia Guru Pembimbing Khusus (GPK), fasilitas dan alat peraga masih terbatas, belum terdapat pedoman pembelajaran adaptif yang baku, dan kebijakan tertulis khusus di tingkat sekolah belum memadai.
2. Tantangan dalam mewujudkan pendidikan inklusif di SDN Keude Batee meliputi keterbatasan GPK dan tenaga ahli, kemampuan guru dalam menangani ABK yang masih perlu ditingkatkan, keterbatasan sarana dan alat peraga, belum adanya pedoman pembelajaran khusus, serta perbedaan karakteristik peserta didik ABK yang membutuhkan penanganan berbeda. Selain itu, dukungan kebijakan dan fasilitas dari pemerintah daerah juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sekolah.

2.4 Saran

Saran penelitian ini ditujukan kepada:

1. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie perlu meningkatkan dukungan terhadap sekolah inklusif melalui penyediaan guru pembimbing khusus, pelatihan berkelanjutan bagi guru reguler, serta pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.
2. Kepada Kepala Sekolah SDN Keude Batee perlu memperkuat pelaksanaan praktik pembelajaran inklusif dengan menyusun strategi pembelajaran yang lebih adaptif, meningkatkan kerja sama antar guru, serta membangun komunikasi yang lebih intensif dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus.
3. Kepada guru yang mengajar dikelas anak ABK diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani anak berkebutuhan khusus melalui pelatihan, seminar, maupun kegiatan pengembangan profesional lainnya.
4. Kepada orang tua anak berkebutuhan khusus yang bersekolah SDN Keude Batee diharapkan lebih aktif bekerja sama dengan pihak sekolah dalam memantau perkembangan anak dan mendukung proses pembelajaran di rumah maupun di sekolah.
5. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji pendidikan inklusif dengan cakupan yang lebih luas, misalnya membandingkan beberapa sekolah inklusif di Kabupaten Pidie atau meneliti efektivitas program dan kebijakan pendidikan inklusif secara lebih mendalam

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Booth, Tony, & Mel Ainscow. (2002). *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- Booth, Tony, & Mel Ainscow. (2011). *Index for Inclusion: Revised Edition*. Bristol: CSIE.
- Booth, Tony, & Mel Ainscow. (2016). *The Index for Inclusion: A Guide to School Development Led by Inclusive Values*. Bristol: CSIE.
- Delphie, Bandi. (2006). *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*. Bandung: Refika Aditama.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Hallahan, Daniel P., James M. Kauffman, & Paige C. Pullen. (2009). *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education* (10th ed.). Boston: Pearson Education Inc.
- Ilahi, Mohammad Takdir. (2013). *Pendidikan Inklusi: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Margono. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudjito, Herizal, Elfindri, & Wardi. (2012). *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media.
- Ridwan. (2004). *Statistika untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, Sopan Aji. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Widiati, Sri, dkk. (2013). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: PT Luxima Metro Media.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Jurnal / Artikel

- Ainscow, Mel. (2005). "Understanding the Development of Inclusive Education System." *Journal of Research in Special Educational Needs*.
- Anwar, Chairul, Laili Komariyah, Ahmad Aznem, Hasbar, Lidyawati Tandi Payung, & Agus Heri Kesuma. (2025). "Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Pendekatan CIPP dan Perspektif Keadilan Sosial." *Journal of Education Research*, 6(3).
- Firdaus. (2018). "Ruang dan Akses Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Pidie." *Sinar Pidie*.
- Gustaman, Randy Fadillah, Agus Gandi, & Nani Ratnaningsih. (2025). "Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak."
- Handayani, Rona, Wiwit Yusnida Ritonga, & Maulida Hasnah Anas. (2023). "Konsep Pembelajaran Anak Inklusif dan Strategi Pembelajaran untuk Anak Inklusif." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).
- Husnullail, M., Risnita, M. Syahrani Jailani, & Asbui. (2024). "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- Kristian, Indra. (2023). "Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2).
- Mardiansah, Rizki Alvi Ramadhan, & Reni Suryani. (2024). "Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus dan Klasifikasinya." *Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 5(1).
- Nisa, Khairun, Sambira Mambela, & Luthfi Isnii Badiah. (2018). "Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus." *Abadimas Adi Buana*.
- Sakinah, Salsabila Feby, & Hendry Andry. (2024). "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tingkat Sekolah Dasar Penggerak Kota Pekanbaru." *Journal of Public Administration Review*, 1(1).
- Saymima, Candra. (2022). "Mengarusutamakan Pendidikan Inklusif." *Sinar Pidie*.
- Saymima, Candra. (2024). "Pidie Didera Kekurangan Guru Pembimbing Khusus di Sekolah-Sekolah Inklusi." *Sinar Pidie*.
- Susanti, Teni, & Nenden Ineu Herawati. (2024). "Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 2(1).

Peraturan Perundang-undangan

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Pemerintah Aceh. (2012). Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pemerintah Aceh. (2025). Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Kabupaten Pidie. (2012). Peraturan Bupati Pidie Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pidie.

Presiden Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.



Lampiran 2 Pertanyaan Penelitian

No	Indikator	Pertanyaan	Narasumber
1.	Kebijakan Inklusif	Bagaimana kebijakan pendidikan Inklusif yang diterapkan di Kabupaten Pidie?	Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie
	Kebijakan Inklusif	Apa tujuan utama penerapan pendidikan inklusif di sekolah dasar di Kabupaten Pidie?	
	Kebijakan Inklusif	Sejak kapan kebijakan ini mulai dijalankan secara resmi, dan apakah ada perubahan besar sejak saat itu?	
	Kebijakan Inklusif	Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah	
	Praktik Inklusif	Program apa saja yang disediakan untuk mendukung kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus?	
	Praktik Inklusif	Bagaimana dinas memastikan praktik inklusif di sekolah berjalan sesuai dengan yang direncanakan?	
	Praktik Inklusif	Kendala apa yang sering ditemukan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar? Bagaimana Strategi Dinas Pendidikan dalam mengatasi kendala tersebut	
	Budaya Inklusif	Bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam mendorong penerimaan dan penghargaan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah	
	Budaya Inklusif	Menurut pengamatan Bapak/Ibu, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap keberadaan sekolah inklusif selama ini?	
2.	Kebijakan Inklusif	Apa saja bentuk program pembinaan yang dijalankan khusus untuk mendukung pendidikan inklusif?	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (DikDas)
	Kebijakan Inklusif	Seberapa sering program pembinaan seperti pelatihan guru atau pendampingan sekolah dilakukan?	
	Kebijakan Inklusif	Apa saja bentuk dukungan khusus (GPK, tenaga ahli, sarana-prasarana, anggaran) yang disediakan Dinas Pendidikan? Siapa yang menyalurkan dukungan tersebut ke sekolah, kapan biasanya diberikan, dan bagaimana proses pengajuannya dari sekolah?	
	Kebijakan Inklusif	Bagaimana mekanisme/sistem penerimaan siswa baru ABK diatur oleh Dinas Pendidikan? Siapa yang berwenang menetapkan kuota atau kriteria penerimaan,	

		dan dimana sistem ini diterapkan (tingkat kabupaten atau per sekolah)?	
	Kebijakan Inklusif	Apa panduan kurikulum adaptif yang diberikan Dinas Pendidikan kepada sekolah inklusif? Bagaimana proses penyusunannya, siapa yang terlibat (guru, ahli, dinas), dan mengapa kurikulum perlu dibuat fleksibel?	
	Budaya Inklusif	Bagaimana Bapak/Ibu melihat perubahan sikap guru atau sekolah setelah mengikuti program pembinaan?	
	Budaya Inklusif	Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apa yang membuat sebagian guru masih ragu menerapkan pendekatan inklusif di kelas?	
	Budaya Inklusif	Bagaimana Dinas Pendidikan, khususnya Bidang Dikdas, membina sekolah agar tercipta hubungan yang harmonis antara guru, siswa, dan seluruh warga sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif?	
	Budaya Inklusif	Upaya apa yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan latar belakang, kemampuan, dan kondisi siswa di lingkungan sekolah dasar?	
	Budaya Inklusif	Bagaimana Dinas Pendidikan memastikan lingkungan sekolah bebas dari stigma, label negatif, dan diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus?	
	Praktik Inklusif	Bagaimana Dinas Pendidikan memantau agar pembelajaran di sekolah responsif terhadap keberagaman siswa? Apa indikator yang digunakan untuk menilainya, dan siapa yang melakukan pemantauan tersebut?	
	Praktik Inklusif	Bagaimana bentuk pendampingan teknis yang diberikan kepada sekolah dalam menjalankan praktik inklusif sehari-hari?	
	Praktik Inklusif	Bagaimana cara memastikan sarana dan prasarana sekolah cukup mendukung siswa berkebutuhan khusus?	
	Praktik Inklusif	Apa tantangan paling umum yang dihadapi sekolah dalam menerapkan praktik inklusif berdasarkan laporan yang masuk?	
3.	Kebijakan Inklusif	Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Keudee Batee sejak pertama kali diterapkan?	Kepala Sekolah SDN Keudee Batee
	Kebijakan Inklusif	Apakah ada kebijakan/aturan tertulis di sekolah yang mengatur tentang keberagaman peserta didik? Seperti apa isinya?	

	Kebijakan Inklusif	Apa saja kebijakan sekolah yang dibuat untuk mendukung pendidikan inklusif? Siapa yang bertanggung jawab mengawasi jalannya kebijakan ini?	
	Kebijakan Inklusif	Bagaimana sekolah mengembangkan visi, misi, atau kebijakan agar dapat menerima dan melayani semua peserta didik tanpa terkecuali?	
	Kebijakan Inklusif	Upaya apa saja yang dilakukan sekolah untuk memastikan lingkungan belajar (fasilitas, kurikulum, metode pengajaran) dapat diakses oleh seluruh peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kemampuan?	
	Budaya Inklusif	Bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang menerima dan menghargai keberagaman peserta didik?	
	Budaya Inklusif	Bagaimana hubungan antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik lainnya di sekolah?	
	Budaya Inklusif	Siapa saja pihak di sekolah (guru, siswa, orang tua) yang paling berperan menjaga suasana inklusif itu?	
	Budaya Inklusif	Apakah ada nilai atau prinsip utama yang dipegang sekolah ini dalam menerima dan mendidik seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus? Bagaimana nilai tersebut disosialisasikan kepada warga sekolah?"	
	Budaya Inklusif	Apakah ada kebijakan, slogan, atau kegiatan rutin di sekolah yang secara khusus dirancang untuk memperkuat rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara seluruh warga sekolah? Bagaimana implementasinya dalam praktik sehari-hari?	
	Praktik Inklusif	Bagaimana sekolah mengatur layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus?	
	Praktik Inklusif	Sarana dan prasarana apa yang tersedia untuk mendukung pendidikan inklusif?	
	Praktik Inklusif	Apa saja fasilitas pendukung yang sudah tersedia dan mana yang masih dirasa kurang?	
	Praktik Inklusif	Kendala apa yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif?	
4.	Praktik Inklusif	Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengajar peserta didik berkebutuhan khusus di kelas?	Guru Sekolah SDN Keudee Batee

	Praktik Inklusif	Bagaimana penyesuaian materi pembelajaran yang dilakukan untuk peserta didik berkebutuhan khusus?	
	Praktik Inklusif	Metode pembelajaran apa yang digunakan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti pelajaran dengan baik?	
	Budaya Inklusif	Bagaimana interaksi antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik lainnya selama pembelajaran berlangsung?	
	Budaya Inklusif	Bagaimana interaksi sosial antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas? Apakah ada bentuk dukungan atau justru penolakan/perundungan yang pernah terjadi?	
	Budaya Inklusif	Sejauh mana orang tua siswa (baik siswa reguler maupun berkebutuhan khusus) mendukung atau terlibat dalam kegiatan sekolah yang bersifat inklusif? Apakah pernah muncul keberatan dari orang tua terkait kebijakan inklusi ini?	
	Kebijakan Inklusif	Dukungan apa yang diberikan sekolah dalam membantu pelaksanaan pembelajaran inklusif?	
	Praktik Inklusif	Kesulitan apa yang paling sering Bapak/Ibu hadapi dalam mengajar peserta didik berkebutuhan khusus?	
	Praktik Inklusif	Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi kesulitan tersebut?	
	Kebijakan Inklusif	Pelatihan atau pembekalan seperti apa yang pernah Bapak/Ibu terima terkait mengajar siswa berkebutuhan khusus?	
5.	Kebijakan Inklusif	Apa alasan Bapak/Ibu memilih SDN Keudee Batee sebagai tempat pendidikan anak?	Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus
	Kebijakan Inklusif	Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu saat mendaftarkan anak di sekolah ini?	
	Kebijakan Inklusif	Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan atau program tertentu dari sekolah/dinas untuk mendukung anak berkebutuhan khusus?	
	Kebijakan Inklusif	Menurut Bapak/Ibu, apa yang masih dirasa kurang dari dukungan kebijakan tersebut?	
	Budaya Inklusif	Bagaimana penerimaan pihak sekolah terhadap anak Bapak/Ibu?	

	Budaya Inklusif	Apakah anak merasa nyaman dan diterima di lingkungan sekolah?	
	Praktik Inklusif	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai proses pembelajaran yang diberikan kepada anak?	
	Praktik Inklusif	Apakah kebutuhan belajar anak mendapatkan perhatian yang sesuai dari guru?	
	Praktik Inklusif	Bagaimana komunikasi yang terjalin antara sekolah dan orang tua terkait perkembangan anak?	
	Praktik Inklusif	Di aspek atau kegiatan sekolah apa Bapak/Ibu merasa anak paling terbantu?	
	Praktik Inklusif	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Keudee Batee ke depan?	



Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp-Fax : 0651-752921

Nomor : B-1204/Un.08/FISIP LPP.00.9/06/2026
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*
Kepada Yth,
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pidie
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802116
Nama : NAILUL MUNA
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : JL. TGK CHIK IBNU LAMPASEH PULO PANJOE

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR NEGERI KEUDEE RATEE KABUPATEN PIDIE**

Banda Aceh, 23 Juni 2026
Ans Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 Oktober 2026

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3 Surat Izin Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Alamat Jl. Tgk. Chik Ditiro Nomor. 8 Blang Aun Kota Ngl. 34112 Telpen 0853-21578
 (Hunting) Laman <https://disdik.pidiekab.go.id> Email disdik.pidie@gmail.com

Nomor : 900.2/44/2026
 Lamp. : -
 Perihal : Izin Mengadakan Penelitian

Yang Terhormat :
 Kepala SD Negeri Keudee Batas
 Kabupaten Pidie
 Di -
 Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Nomor : B-1204/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/06/2026 Tanggal 23 Juni 2026, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Menearangkan bahwa :

Nama : **HAZILUL MUNA**
 N I M : **220802116**
 Jurusan/Prodi : **Ilmu Administrasi Negara**

Untuk mengadakan penelitian / mengumpulkan data pada **SD Negeri Keudee Batas** Kabupaten Pidie sebagai berikut :

1. Harus berkonsultasi langsung dengan Kepala Sekolah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar
2. Bagi yang bersangkutan supaya menyempatkan foto copy hasil penelitian ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul :

"Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah dasar Negeri Keudee Batas Kabupaten Pidie"

Demikian surat ini diberikan kepada saudara guna penyelesaian selanjutnya, terima kasih.

Soll. 14 Juli 2026
 29 Muharram 1448 H
 M. KEBALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN

Dr. DSAI F. S. Pd, M. Pd
 NIDNINA / 2008 197005011999031602
 Nomor: 21.2/110/2026, Tanggal 11 Juni 2026

Tembusan :
 1. Ketua Prodi yang bersangkutan
 2. Asip

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 4 Dokumen Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie



Gambaar 2. Wawancara dengan Kepala Dikdas



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Keude Batee



Gambar 4. Wawancara Dengan Guru 1 Sekolah Sdn Keude Batee



Gambar 5. Wawancara Dengan Guru 2 Sekolah Sdn Keude Batee



Gambar 6. Wawancara dengan orang tua anak berkebutuhan khusus 1



Gambar 7. Wawancara dengan Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Nailul Muna
 Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Panjoe, 12 November 2000
 Nomor Handphone : 0813-9459-0373
 Alamat : Desa Pulo Panjoe, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie
 Email : 220802116@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN 38 Cot Glumpang
 Sekolah Menengah Pertama : MTSN 12 Pidie
 Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Jangka Buya

Sertifikasi

Ma'had Jami'ah	: A-	2023	Ma'had Al-Jamiah
TOAFL	: 420	2026	Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer	: B-	2023	ICT UIN Ar-Raniry
Magang	: A	2025	BPSDM Aceh
KPM	: A	2025	Desa Siem, Darussalam, Aceh Besar